



LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 067

TAHUN 2017 AUDITED

KEMENTERIAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited* Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited* ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Disamping itu, Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Sekretaris Jenderal



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	77
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	89
F. Pengungkapan Penting Lainnya	95
Lampiran dan Daftar	127

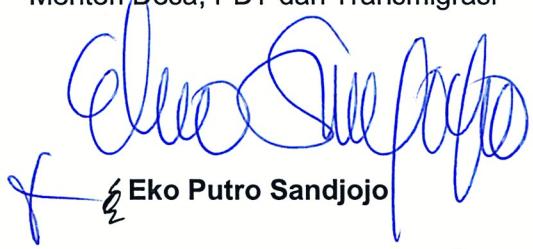


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi



The signature is handwritten in blue ink and appears to read "Eko Putro Sandjojo". A small checkmark is present to the left of the signature.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 *Audited* telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Realisasi Pendapatan Negara 31 Desember 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.305.076.219,00. Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.182.348.770.554,00 atau mencapai 88,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.751.565.972.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.441.286.386.234,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp400.839.036.015,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.498.357.517.119,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.542.089.833.100,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp6.631.153.786,00; dan Rp3.434.655.232.448,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.396.995.596,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.5.371.944,127.077,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.369.547.131.481,00). Surplus/Defisit

Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-PoS Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(2.666.156.239.692,00) dan Rp(8.035.703.371.173,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(8.035.703.371.173,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp7.228.543.249.511,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(8.035.703.371.173,00), ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp67.695.718.473,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp4.174.119.635.637,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp3.434.655.232.448,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2017		% thd Angg	31 DESEMBER 2016
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	540.000.000	20.305.076.219	3760,20	44.997.050.753
JUMLAH PENDAPATAN		540.000.000	20.305.076.219	3760,20	44.997.050.753
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	261.829.237.000	208.337.577.246	79,57	209.511.238.848
Belanja Barang	B.2.2	4.290.694.064.000	3.781.100.564.852	88,12	5.006.395.650.865
Belanja Modal	B.2.3	199.042.671.000	192.910.628.456	96,92	599.972.148.071
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		4.751.565.972.000	4.182.348.770.554	88,02	5.815.879.037.784

II. NERACA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2017	2016
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran		C.1	18.938.471	222.396.599
Kas Lainnya dan Setara Kas		C.2	1.182.986	142.337
Piutang Bukan Pajak		C.3	964.895.514	21.395.514
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan pajak		C.4	(4.824.477)	(106.978)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		C.5	960.071.037	21.288.536
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		C.6	88.468.100	88.468.100
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		C.7	(442.338)	(442.338)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		C.8	88.025.762	88.025.762
Persediaan		C.9	399.770.817.759	1.369.671.545.946
Jumlah Aset Lancar			400.839.036.015	1.370.003.399.180
ASET TETAP				
Tanah		C.10	120.992.735.697	136.523.334.174
Peralatan dan Mesin		C.11	331.245.725.328	313.652.551.221
Gedung dan Bangunan		C.12	330.387.908.090	576.038.877.297
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		C.13	965.108.724.575	1.963.043.790.949
Aset Tetap Lainnya		C.14	212.537.171.053	311.138.739.396
Konstruksi dalam Pengerjaan		C.15	24.495.714.219	35.864.803.190
AKUMULASI PENYUSUTAN		C.16	(486.410.461.843)	(669.877.124.625)
Jumlah Aset Tetap			1.498.357.517.119	2.666.384.971.602
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud		C.17	7.775.495.654	6.860.302.507
Aset Lain-Lain		C.18	2.501.523.762.400	4.304.338.746.103
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		C.19	(967.209.424.954)	(1.107.752.966.203)
Jumlah Aset Lainnya			1.542.089.833.100	3.203.446.082.407
JUMLAH ASET			3.441.286.386.234	7.239.834.453.189
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga		C.20	6.611.032.907	11.068.690.443
Uang Muka dari KPPN		C.21	18.938.471	222.396.599
Utang Jangka Pendek Lainnya		C.22	1.182.408	116.636
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			6.631.153.786	11.291.203.678
JUMLAH KEWAJIBAN			6.631.153.786	11.291.203.678
EKUITAS				
Ekuitas		C.23	3.434.655.232.448	7.228.543.249.511
JUMLAH EKUITAS			3.434.655.232.448	7.228.543.249.511
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			3.441.286.386.234	7.239.834.453.189

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Pajak Penghasilan		-	-
Pendapatan Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		2.396.995.596	5.087.576.605
JUMLAH PENDAPATAN		2.396.995.596	5.087.576.605
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	208.337.577.246	209.511.238.848
Beban Persediaan	D.3	30.757.714.036	68.562.192.376
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.218.784.029.453	2.143.161.051.241
Beban Pemeliharaan	D.5	37.580.345.894	42.440.023.517
Beban Perjalanan Dinas	D.6	595.672.353.870	481.726.403.174
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.882.412.351.506	4.176.035.068.711
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	3.837.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	398.394.930.595	552.026.450.465
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	4.824.477	46.163.025
JUMLAH BEBAN		5.371.944.127.077	7.673.512.428.357
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.369.547.131.481)	(7.668.424.851.752)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(2.696.346.959.672)	(369.059.483.834)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		462.370.000	188.700.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.696.809.329.672	369.248.183.834
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		30.190.719.980	39.675.097.951
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		92.276.244.090	296.957.530.311
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		62.085.524.110	257.282.432.360
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(2.666.156.239.692)	(329.384.385.883)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.035.703.371.173)	(7.997.809.237.635)
SURPLUS/DEFISIT LO		(8.035.703.371.173)	(7.997.809.237.635)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
EKUITAS AWAL	E.1	7.228.543.249.511	7.377.127.265.933
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.035.703.371.173)	(7.997.809.237.635)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	67.695.718.473	2.109.806.085.561
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4	-	(3.164.869.163)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5	5.216.650.987	120.498.771.191
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	60.901.552.896	1.790.921.469.119
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8	1.577.514.590	201.550.714.414
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	4.174.119.635.637	5.739.419.135.652
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.10	(3.793.888.017.063)	(148.584.016.422)
EKUITAS AKHIR	E.11	3.434.655.232.448	7.228.543.249.511

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yakni:

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan penggabungan dari Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Eks-Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen PPMD dan Ditjen PKP dari Kementerian Dalam Negeri, serta Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, terdapat sembilan program yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang disebut NAWAKERJA, yaitu:

- a. Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015.
- b. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang.
- c. Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDes.
- d. Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan.

- e. Pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri.
- f. Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp1,4 miliar per desa secara bertahap.
- g. Penyaluran modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa.
- h. *Pilot project* sistem pelayanan publik jaringan koneksi *online* di 5.000 desa.
- i. “Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar, dan terpencil melalui pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi.

Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), yaitu:

Tabel 1 Satker UAPPA-E1

KODE SATKER	NAMA SATKER
067 02	Inspektorat Jenderal
067 03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
067 04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
067 05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
067 06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
067 07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
067 08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067 09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi
067 10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri dari 9 UKE 1 dengan jumlah satker berdasarkan aplikasi e-Rekon adalah

sebanyak 273 Satker yang merupakan satker aktif dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode E1	Nama UKE 1	Satker Aktif	Satker Tidak Aktif	Total Satker
1	06702	Inspektorat Jenderal	1	-	1
2	06703	Ditjen PPMD	100		100
3	06704	Ditjen PKP	1		1
4	06705	Ditjen PDTu	1		1
5	06706	Ditjen PDT	25		25
6	06707	Ditjen PKP2Trans	64		64
7	06708	Ditjen PKTrans	68		68
8	06709	Balilatfo	12		12
9	06710	Setjen KDPDTT	1		1
		Total	273		273

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAIBA yang selanjutnya melakukan *upload* dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan mengunduh dari Aplikasi e-rekon-LK Satker.

Mulai tahun 2016 sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pedoman Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan proses Rekonsiliasi antara UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan oleh satker dengan KPPN setempat.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja*Belanja*

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban*Beban*

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset*Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar*Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendahara

an/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban*Kewajiban*

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Tahun 2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 6 (enam) kali dan POK sebanyak 5 (lima) kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perubahan Anggaran
Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari pengelolaan BMN	540.000.000	540.000.000
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan iuran dan denda	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	540.000.000	540.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	273.724.665.000	261.829.237.000
Belanja Barang	4.346.254.074.000	4.290.694.064.000
Belanja Modal	184.934.514.000	199.042.671.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	4.804.913.253.000	4.751.565.972.000

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maka perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perubahan Revisi Anggaran per Program
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Program	Anggaran	Anggaran setelah Revisi
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	56.500.000.000,00	56.500.000.000,00
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.876.874.901.000,00	2.819.997.515.000,00
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	321.540.655.000,00	291.540.655.000,00
Program Pengembangan Daerah tertentu	260.953.983.000,00	226.224.766.000,00
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	317.254.463.000,00	217.723.218.000,00
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	377.112.440.000,00	357.696.391.000,00
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	84.431.687.000,00	269.516.891.000,00
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan informasi	210.245.124.000,00	210.461.124.000,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KDPDTT	300.000.000.000,00	301.905.412.000,00
Jumlah	4.804.913.253.000,00	4.751.565.972.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp 20.305.076.219 ,00

Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 20.305.076.219,00 atau mencapai 3.760,2 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 540.000.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Estimasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

No	Uraian	Estimasi	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Anggaran
1.	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 540.000.000	Rp. 560.284.715	103,76
2.	Pendapatan dari Pemindahtempatan BMN Lainnya	-	Rp. 462.370.000	0

3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	Rp.1.301.089.443	0
4.	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	Rp. 41.250.000	0
5.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	Rp.74.811.745	0
6.	Pendapatan Bunga Lainnya	-	Rp. 9.938.147	0
7.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	Rp.398.822.335	0
8.	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	-	Rp. 5.605.955	0
9.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan ganti Rugi Non Perbendaharaan	-	Rp. 3.336.000	0
10.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	-	Rp. 5.000.000	0
11.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	Rp. 91.524.162	0
12.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	Rp.11.598.977.572	0
13.	Penerimaan Kembali Belanja	-	Rp.2.235.961.741	0
14.	Penerimaan Kembali Belanja	-	Rp. 24.087.176	0
15.	Penerimaan Kembali Belanja Bansos TAYL	-	Rp. 3.477.707.750	0
16.	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR	-	Rp. 10.915.800	0
17.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	Rp. 3.393.678	0
Jumlah		Rp.540.000.000	Rp. 20.305.076.219	3.760,2

Realisasi Pendapatan TA 2017 di atas estimasi pendapatan sebagian besar berasal dari Pendapatan denda keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, Penerimaan Kembali Belanja Bansos TAYL.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2017 dibandingkan dengan TA 2016 terdapat penurunan sebesar 54,87 persen. Hal ini disebabkan karena menurunya Pendapatan Jasa, Pendapatan Iuran dan Denda, serta Pendapatan Lain-lain.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.364.994.158	1.586.410.333	49,08
Pendapatan Jasa	84.749.892	357.315.580	-76,28
Pendapatan Iuran dan Denda	404.428.290	3.258.307.725	-87,59
Pendapatan Lain-lain	17.450.903.879	39.795.017.115	-56,15
Jumlah	20.305.076.219	44.997.050.753	-54,87

Realisasi Anggaran Pendapatan per Unit Eselon I lingkup Kementerian Desa, PDT dan Tranmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Realisasi Anggaran Pendapatan per Eselon I
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	NAIK (TURUN) %
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
67.01	Kementerian	-	49,360,200	0
067.02	Inspektorat Jenderal	-	1,890	0
067.03	Ditjen PPMD	-	4,990,398,354	0
067.04	Ditjen PKP	-	739,706,286	0
067.05	Ditjen PDTu	-	5,472,856,131	0
067.06	Ditjen PDT	-	2,732,077,915	0
067.07	Ditjen PKP2TRans	-	2,308,213,022	0
067.08	Ditjen PKTrans	-	1,400,557,293	0
067.09	Balilatfo	540,000,000	740,032,165	137.04
067.10	Sekretariat Jenderal	-	1,871,872,963	0
JUMLAH		540,000,000	20,305,076,219	3,760.20

Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian jenis Pendapatan sesuai akun
TA 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	% NAIK (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtempatannya) serta Pendapatan dari Penjualan			
Pendapatan penjualan hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	560,284,715	470,793,205	
Pendapatan dari Pemindahtempatannya BMN	462,370,000	188,700,000	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,301,089,443	926,917,128	
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	41,250,000	-	
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2,364,994,158	1,586,410,333	
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	74,811,745	357,315,580	-
Jumlah Pendapatan Jasa	74,811,745	357,315,580	-
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Bunga Lainnya	9,938,147	-	
Jumlah Pendapatan Bunga	9,938,147	-	
Pendapatan Iuran dan Denda			
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	398,822,335	3,258,307,725	
Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	5,605,955	-	
Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda	404,428,290	3,258,307,725	
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	3,336,000	36,514,600	
Pendepatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	5,000,000	17,653,890	
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	91,524,162	1,432,765,466	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	11,598,977,572	24,032,720,423	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	2,235,961,741	10,118,219,928	
Penerimaan Kembali Belanja Hibah TAYL	24,087,176	641,236,200	
Penerimaan Kembali Belanja Bansos TAYL	3,477,707,750	3,431,568,596	
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	10,915,800	10,095,045	
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL	-	-	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3,393,678	74,242,967	
Jumlah Pendapatan Lain-lain	17,450,903,879	39,795,017,115	-
Jumlah	20,305,076,219	44,997,050,753	-

Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2017 sebesar Rp1.301.089.443,00 berasal dari :

- 1) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sebesar Rp. 7,658,586,- (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang dipotong langsung melalui SPM Gaji;
- 2) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 18,000,000,- (delapan belas juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor NTPN 7470876HQA9U351P;
- 3) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun

- 2017 di Kalibata sebesar Rp. 58,500,000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Nomor NTPN C9CA076K1ANJDP1P;
- 4) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 27,250,000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 2 Maret 2017 dengan Nomor NTPN 305312L2NJB7L9F9;
- 5) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 34,000,000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 14 maret 2017 dengan Nomor NTPN 4393D8ILSKDLQPL9;
- 6) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 17,000,000,- (tujuh belas juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor NTPN 372A88IH38BE870P;
- 7) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 32,000,000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor NTPN 5EADF3F2611CQCEP;
- 8) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 144,091,523,- (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 22 Mei 2017 dengan Nomor NTPN CF0BC26IMH8AS7P9;
- 9) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 30,250,000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor NTPN 51F478DHAS7FT74P;
- 10) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 17,000,000,- (tujuh belas juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 04 April 2017 dengan Nomor NTPN FBD2F7UQS1M67JI9;
- 11) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 38,750,000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 12 April 2017 dengan Nomor NTPN 481011F6DKTKL4M9;

- 12) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 25,500,000,- (dua puluh lima juta lima ratus rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 21 April 2017 dengan Nomor NTPN 5A9622KHC9MUQVIP;
- 13) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 42,500,000,- (empat puluh dua juta lima ratus rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 28 April 2017 dengan Nomor NTPN 5829D1A6MNBQ3FU9;
- 14) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 42,500,000,- (empat puluh dua juta lima ratus rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor NTPN 191E86RTSOG17D19;
- 15) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 55,750,000,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor NTPN 9D74B2HAR4D76IT9;
- 16) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 42,500,000,- (empat puluh dua juta lima ratus rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor NTPN E6D8A2HLEOUAF9T9;
- 17) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 30,750,000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 21 Juli 2017 dengan Nomor NTPN 905952FVS8NGI38P;
- 18) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 27,000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 21 Juli 2017 dengan Nomor NTPN 7538C2FU3PV0CH8P;
- 19) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 31,750,000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 31 Juli 2017 dengan Nomor NTPN 5A12C2E7U32LELTP;
- 20) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 48,250,000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal

- 10 Agustus 2017 dengan Nomor NTPN 9CAF87MLA2KDEHD9;
- 21) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 29,000,000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 10 Agustus 2017 dengan Nomor NTPN 681967MK2PB942D9;
- 22) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 59,500,000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor NTPN 0EEB44SSPVVGBN49;
- 23) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 17,000,000,- (tujuh belas juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan Nomor NTPN BF21F1TCFNN73JN9;
- 24) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 51,000,000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 14 September 2017 dengan Nomor NTPN 5A5D827KNA1CMI19;
- 25) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 15 September 2017 dengan Nomor NTPN 4026B4BADTVGDLPP;
- 26) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) sewa gedung makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 54,750,000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 29 September 2017 dengan Nomor NTPN FD6F80H70JBUMDGP;
- 27) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang Muka sewa gedung balai makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 26,250,000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor NTPN CFEC76Q1RT6SU829;
- 28) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Oktober tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 30,250,000,- (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Nomor NTPN B10EB6Q3V4I8JN29;

- 29) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang muka sewa gedung balai makarti tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Nomor NTPN 4F5F020OCT4QK8HI;
- 30) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Oktober tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 34,000,000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Nomor NTPN 1C2CD20RG4UO1LHI;
- 31) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Oktober tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 25,500,000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 01 Nopember 2017 dengan Nomor NTPN 680E84HLB9BMTT6I;
- 32) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Oktober tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 34,000,000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 15 Nopember 2017 dengan Nomor NTPN 2D8264OS2TST4FTP;
- 33) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Nopember tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 25,500,000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 17 Nopember 2017 dengan Nomor NTPN 9DE640GDQDNLTNEP;
- 34) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Oktober tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 34,000,000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 28 Nopember 2017 dengan Nomor NTPN 4888823AHI6JRAS9;
- 35) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Desember tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 25,500,000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 07 Desember 2017 dengan Nomor NTPN 522541FF2N3VNGBI;
- 36) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Nopember tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 25,500,000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada

- tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor NTPN 5C7D6785Q6105ON9;
- 37) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Desember tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 29,000,000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor NTPN 1A0D942BV3A3S3P9;
- 38) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan Desember tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) yang disetor ke KAS Negara Menggunakan SSBP pada tanggal 29 Desember 2017 dengan Nomor NTPN 8B6B01N7MHER2F6P;
- 39) Penerimaan Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (MAP: 423141) Uang sewa gedung balai makarti bulan tahun 2017 di Kalibata sebesar Rp997.920,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) merupakan potongan langsung melalui SPM.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Rp4.182.348.770.554,00

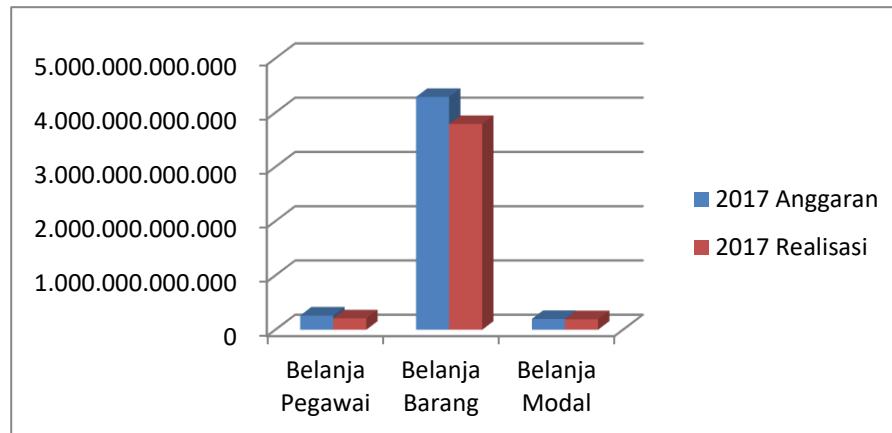
Realisasi Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada TA 2017 adalah sebesar Rp4.182.348.770.554,00 atau 88,02 persen dari anggaran belanja sebesar Rp4.751.565.972.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
TA 2017*

Dalam Rupiah

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Pegawai	261,829,237,000	209,924,835,799	80.18
Belanja Barang	4,290,694,064,000	3,791,585,117,332	88.37
Belanja Modal	199,042,671,000	193,039,726,238	96.98
Total Belanja Kotor	4,751,565,972,000	4,194,549,679,369	88.28
Pengembalian Belanja	-	12,200,908,815	-
Total Belanja	4,751,565,972,000	4,182,348,770,554	88.02

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan Anggaran dan Realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program
TA 2017
Dalam Rupiah*

Program	Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	56.500.000.000,00	48.408.889.855
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.819.997.515.000,00	2.352.085.271.709,00
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	291.540.655.000,00	285.967.514.467,00
Program Pengembangan Daerah Tertentu	226.224.766.000,00	198.406.272.035,00
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	217.723.218.000,00	198.877.358.230,00
Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	357.696.391.000,00	341.258.810.570,00
Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	269.516.891.000,00	292.277.628.018,00
Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan informasi	210.461.124.000,00	193.001.726.897,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KDPDTT	301.905.412.000,00	272.065.298.773,00
Jumlah	4.751.565.972.000,00	4.182.348.770.554,00

Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar 28,09 persen dibandingkan pada TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penghematan anggaran serta adanya *self Bloking* kegiatan.
2. Tidak adanya Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Rincian perbandingan Realisasi Belanja tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi jenis Belanja
TA 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	208,337,577,246	209,511,238,848	(0.56)
Belanja Barang	3,781,100,564,852	5,006,395,650,865	(24.47)
Belanja Modal	192,910,628,456	599,972,148,071	(67.85)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4,182,348,770,554	5,815,879,037,784	(28.09)

B.3. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp208.337.577.
246*

Pada umumnya Belanja Pegawai pada seluruh UKE-1 adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp208.337.577.246,00 dan Rp209.511.238.848,00 atau terjadi penurunan sebesar 0,56 persen dari TA yang lalu karena adanya pegawai yang pensiun, perhitungan kembali akan kebutuhan belanja pegawai dan tidak adanya penerimaan CPNS di tahun 2016 dan 2017.

Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi
067.02	Inspektorat Jenderal	13.942.743.000	9.747.376.617
067.03	Ditjen PPMD	26.550.254.000	15.930.063.451
067.04	Ditjen PKP	14.942.759.000	13.806.344.893
067.05	Ditjen PDTu	16.529.265.000	13.753.408.686
067.06	Ditjen PDT	23.957.255.000	13.950.260.441
067.07	Ditjen PKP2TRans	32.381.442.000	31.988.934.435
067.08	Ditjen PKTrans	30.259.252.000	25.600.975.917
067.09	Balilatfo	54.940.837.000	48.121.140.614
067.10	Sekretariat Jenderal	48.325.430.000	35.439.072.192
JUMLAH		261.829.237.000	208.337.577.246

Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	124,261,953,303	129,135,953,939	(3.77)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	183,750,000	175,112,870	4.93
Belanja Lembur	14,746,387,384	14,135,765,686	4.32
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai Transito	70,732,745,112	69,006,493,080	2.50
Jumlah Belanja Kotor	209,924,835,799	212,453,325,575	(1.19)
Pengembalian Belanja Pegawai	1,587,258,553	2,942,086,727	-
Jumlah Belanja	208,337,577,246	209,511,238,848	(0.56)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp3.781.100.564.852,00

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 3.781.100.564.852,00 dan Rp 5.006.395.650.865,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 24,47 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2016.

Belanja Barang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Barang per Eselon I
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	NAIK (TURUN) %
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
067.02	Inspektorat Jenderal	42,331,887,000	38,437,581,438	90.80
067.03	Ditjen PPMD	2,747,818,219,000	2,328,634,162,914	84.74
067.04	Ditjen PKP	273,891,101,000	269,464,414,074	98.38
067.05	Ditjen PDTu	207,434,819,000	182,427,042,744	87.94
067.06	Ditjen PDT	191,660,963,000	182,831,315,789	95.39
067.07	Ditjen PKP2TRans	233,920,215,000	221,421,757,038	94.66
067.08	Ditjen PKTrans	201,266,493,000	192,781,026,840	95.78
067.09	Balilatfo	153,368,852,000	142,780,304,528	93.10
067.10	Sekretariat Jenderal	239,001,515,000	222,322,959,487	93.02
JUMLAH		4,290,694,064,000	3,781,100,564,852	88.12

Perbandingan belanja Barang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Belanja Barang
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	94,034,020,005	125,500,803,307	(25.07)
Belanja Barang Non Operasional	308,038,401,345	275,424,575,222	11.84
Belanja Barang Persediaan	28,825,411,255	36,426,722,593	(20.87)
Belanja Jasa	1,817,348,901,345	1,774,178,071,042	2.43
Belanja Pemeliharaan	37,436,481,599	45,359,050,777	(17.47)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	602,459,551,642	484,338,278,577	24.39
Belanja Perjalanan Luar negeri	1,030,490,032	2,954,648,242	(65.12)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	609,411,867,109	712,120,621,871	(14.42)
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	-	1,686,294,000	(100.00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	292,999,993,000	1,553,110,669,855	(81.13)
Jumlah Belanja Kotor	3,791,585,117,332	5,011,099,735,486	(24.34)
Pengembalian Belanja	10,484,552,480	4,704,084,621	
Jumlah Belanja	3,781,100,564,852	5,006,395,650,865	(24.47)

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp 192.910.628.
456,00*

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 192.910.628.456,00 dan Rp 599.972.148.071,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar 67,85 persen dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh berkurangnya pagu belanja modal dibandingkan Tahun sebelumnya.

Rincian Belanja Modal sebagai berikut :

Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Modal per Eselon I
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	NAIK (TURUN) %
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
067.02	Inspektorat Jenderal	225,370,000	223,931,800.00	99.36
067.03	Ditjen PPMD	9,292,587,000	7,521,045,344.00	80.94
067.04	Ditjen PKP	2,706,795,000	2,696,755,500.00	99.63
067.05	Ditjen PDTu	2,260,682,000	2,225,820,605.00	98.46
067.06	Ditjen PDT	2,105,000,000	2,095,782,000.00	99.56
067.07	Ditjen PKP2TRans	91,394,734,000	87,848,119,097.00	96.12
067.08	Ditjen PKTrans	74,327,601,000	73,895,625,261.00	99.42
067.09	Balilatfo	2,151,435,000	2,100,281,755.00	97.62
067.10	Sekretariat Jenderal	14,578,467,000	14,303,267,094.00	98.11
	JUMLAH	199,042,671,000	192,910,628,456.00	96.92

Perbandingan Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal**Tahun 2017 dan 2016**Dalam Rupiah*

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,769,171,993	59,957,769,379	(48.68)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,739,620,788	81,963,798,424	(63.72)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	131,435,139,932	455,985,556,250	(71.18)
Belanja Modal Lainnya	1,095,793,525	2,128,886,650	(48.53)
Jumlah Belanja Kotor	193,039,726,238	600,036,010,703	-67.83
Pengembalian	129,097,782	63,862,632	-
Jumlah Belanja	192,910,628,456	599,972,148,071	(67.85)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja
Peralatan dan
Mesin
Rp30.769.171.9
93,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.769.171.993,00 dan Rp 59.957.769.379,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar 48.68 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penghematan anggaran.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per Eselon I Tahun Anggaran 2017**Dalam Rupiah*

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	NAIK (TURUN) %
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
067.02	Inspektorat Jenderal	225.370.000	223.931.800	99,36
067.03	Ditjen PPMD	8.418.220.000	7.281.185.344	86,49
067.04	Ditjen PKP	2.706.795.000	2.696.755.500	99,63
067.05	Ditjen PDTu	1.535.682.000	1.511.630.605	98,43
067.06	Ditjen PDT	1.905.000.000	1.898.032.000	99,63
067.07	Ditjen PKP2TRans	2.751.356.000	2.683.648.975	97,54
067.08	Ditjen PKTrans	4.996.673.000	4.987.966.000	99,83
067.09	Balilatfo	1.987.435.000	1.936.817.281	97,45
067.10	Sekretariat Jenderal	7.787.792.000	7.549.204.488	96,94
	JUMLAH	32.314.323.000	30.769.171.993	95,22

Perbandingan Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.944.008.193	59.957.769.379	(50,06)
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	825.163.800	0	-
Jumlah Belanja Kotor	30.769.171.993	59.957.769.379	(48,68)
Pengembalian	0	8.000.000	-
Jumlah Belanja	30.769.171.993	59.949.769.379	(48,68)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp29.739.620.788,00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp29.739.620.788,00 dan Rp81.945.947.424,00. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 63,71 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per Eselon I Tahun Anggaran 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
067.02	Inspektorat Jenderal	-	-	
067.03	Ditjen PPMD	41.500.000	41.360.000	99,66
067.04	Ditjen PKP	-	-	
067.05	Ditjen PDTu	-	-	
067.06	Ditjen PDT	200.000.000	197.750.000	98,88
067.07	Ditjen PKP2TRans	20.236.782.000	19.029.908.382	94,04
067.08	Ditjen PKTrans	3.928.562.000	3.926.539.800	99,95
067.09	Balilatfo	60.000.000	60.000.000	100,00
067.10	Sekretariat Jenderal	6.520.675.000	6.484.062.606	99,44
	JUMLAH	30.987.519.000	29.739.620.788	95,97

Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,406,857,488	64,168,895,424	(60.41)
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0		-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	65,690,000	-100.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	749,147,500	2,714,072,500	-72.40
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	37,800,000	0.00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,583,615,800	14,977,340,500	-76.07
Jumlah Belanja Kotor	29,739,620,788	81,963,798,424	(63.72)
Pengembalian Belanja Modal	0	17,851,000	0.00
Jumlah Belanja	29,739,620,788	81,945,947,424	(63.71)

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal JIJ
Rp131.306.042.
150,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp131.306.042.150,00 dan Rp455.947.544.618,00. Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2017 mengalami penurunan sebesar 71.20 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran.

Belanja Modal JIJ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ
per Eselon I Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	NAIK (TURUN) %
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
067.02	Inspektorat Jenderal	-	-	-
067.03	Ditjen PPMD	199.000.000	198.500.000	99,75
067.04	Ditjen PKP	-	-	-
067.05	Ditjen PDTu	-	-	-
067.06	Ditjen PDT	-	-	-
067.07	Ditjen PKP2TRans	68.406.596.000	66.134.561.740	96,68
067.08	Ditjen PKTrans	65.343.622.000	64.929.515.936	99,37
067.09	Balilatfo	44.000.000	43.464.474	98,78
067.10	Sekretariat Jenderal	-	-	-
	JUMLAH	133.993.218.000	131.306.042.150	97,99

Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Rincian Realisasi JIJ

Tahun 2017 dan 2016

Dalam Rupiah

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Bahan Baku	0	0	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	67.645.757.522	155.321.578.300	(56,45)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	2.600.000	-
Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan	0	18.331.000	(100,00)
Belanja Modal Irrigasi	12.701.112.474	7.035.475.000	80,53
Belanja Modal Jaringan	198.500.000	18.871.415.000	(98,95)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	49.118.635.836	269.600.781.950	(81,78)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	1.771.134.100	5.135.375.000	(65,51)
Jumlah Belanja Kotor	131.435.139.932	455.985.556.250	(71,18)
Pengembalian Belanja Modal	129.097.782	38.011.632	-
Jumlah Belanja	131.306.042.150	455.947.544.618	(71,20)

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya
Rp1.095.793.525,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.095.793.525,00 dan Rp2.128.886.650,00. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan sebesar 48,53 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran.

Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per Eselon I Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Eselon I	Estimasi	Realisasi	Realisasi
Kode	Eselon I	Anggaran	Realisasi	%
067.02	Inspektorat Jenderal	-	-	
067.03	Ditjen PPMD	633.867.000	-	0
067.04	Ditjen PKP	-	-	
067.05	Ditjen PDTu	725.000.000	714.190.000	98,51
067.06	Ditjen PDT	-	-	
067.07	Ditjen PKP2TRans	-	-	
067.08	Ditjen PKTrans	58.744.000	51.603.525	87,84
067.09	Balilatfo	60.000.000	60.000.000	100
067.10	Sekretariat Jenderal	270.000.000	270.000.000	100
	JUMLAH	1.747.611.000	1.095.793.525	62,70

Perbandingan Rincian Belanja Modal Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Realisasi
Belanja Modal Lainnya
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	1,047,049,525	1,476,660,500	(29.09)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya	48,744,000	652,226,150	(92.53)
Jumlah Belanja Kotor	1,095,793,525	2,128,886,650	(48.53)
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja	1,095,793,525	2,128,886,650	(48.53)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp400.839.036.015,00 dan Rp1.370.003.399.180,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji sebagai berikut :

*Rincian Aset Lancar
Tahun 2017 dan 2016*

(dalam rupiah)

No.	Aset Lancar	31-Dec-17	31-Des-16
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	18.938.471	222.396.599
2	Kas lainnya dan Setara Kas	1.182.986	142.337
3	Piutang Bukan Pajak	964.895.514	21.395.514
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-4.824.477	-106.978
5	Piutang Bukan Pajak (Netto)	960.071.037	21.288.536
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	88.468.100	88.468.100
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-442.338	-442.338
8	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	88.025.762	88.025.762
9	Persediaan	399.770.817.759	1.369.671.545.946
	Jumlah	400.839.036.015	1.370.003.399.180

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp18.938.471,0
0*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp18.938.471,00 dan Rp222.396.599,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I
Per 31 Desember 2017*

(dalam rupiah)

Unit Kerja	Tahun 2017	Tahun 2016
Ditjen PPMD	8.976.970,00	86.665.249,00
Ditjen PKP2Trans	3.181.501,00	109.064.350,00
Ditjen PKTrans	6.780.000,00	26.443.000,00
Balilatfo	0,00	224.000,00
Jumlah	18.938.471,00	222.396.599,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.938.471,00 pada satker di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca 31 Desember 2016 dan baru dipertanggungjawabkan pada awal Tahun 2017.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PPMD Per 31 Desember 2017 pada Satker BPMPD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 8.976.970, yang pada tanggal 31 Desember 2017 terlambat disetorkan ke Kas Negara. Saldo tersebut telah disetor ke Kas Negara NTPN No.2281F5QFLDC26DSI tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp435.000 dan NTPN No.C74285QG81DHODSI tanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp.8.541.970

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PKP2Trans Per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.181.501,00 terdapat di

Disnakertrans Kabupaten Muna Barat yang merupakan setoran UP Tahun Anggaran 2017. Satker sudah menyetorkan kembali pada tanggal 08 Januari 2018 dengan NTB:005840000080 NTPN:3GD0600117CABP77

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Ditjen PKTrans Per 31 Desember 2017 terjadi pada Satker Dinsosnakertrans Kabupaten Toli-toli sebesar Rp5.480.000,00 dan Disnakertrans Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp1.300.000,00. Kedua Satker tersebut baru melakukan penyetoran pengembalian ke Kas Negara pada Bulan Januari Tahun 2018

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp1.182.986,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.182.986,00 dan Rp142.337,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,182,986	142,337
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	1,182,986	142,337

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2016 sebesar Rp142.337,00 berasal dari berasal dari pajak atas PPn yang belum disetor sampai dengan bulan Desember 2015 serta adanya setoran belanja yang baru disetor di bulan Januari 2016. Sedang Kas Lainnya setara Kas Tahun 2017 berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa atas pajak PPn yang belum disetor sampai dengan bulan Desember 2017 serta adanya setoran belanja yang baru disetor di bulan Februari 2018.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas terdapat pada Satker Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 1.182.408 dan telah disetor ke Kas Negara dengan NTPN sebagai berikut:

1. 677300H4P9N5S3G tanggal 15 Februari 2018
Rp.492.000,00
2. 4FAD60H4ON2VMA3G tanggal 15 Februari 2018
Rp.90.909,00
3. 8D52D0H4PSB2LE3G tanggal 15 Februari 2018
Rp.34.000,00
4. F58690H4QEY4503G tanggal 15 Februari 2018
Rp.100.000,00
5. 7B0C40H4R1J5KI3G tanggal 15 Februari 2018
Rp.265.500,00
6. 868F70H4RK77443G tanggal 15 Februari 2018
Rp.96.909,00
7. 132390H4O4EU6O3G tanggal 15 Februari 2018
Rp.18.181,00
8. 4ED4E0H4NHQSN63G tanggal 15 Februari 2018
Rp.90.909,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp964.895.514,
00*

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp964.895.514,00 dan Rp21.395.514,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berasal dari Ditjen PPMD merupakan pengembalian ke kas negara dikarenakan Surat Perintah Membayar (SPM) ganda sebesar Rp950.000.000,00 dan Ditjen PKP2Trans Tahun 2017 oleh Disnakertrans Kabupaten Bima, nilai Piutang Bukan Pajak atas Temuan BPK Tahun 2016 dan Tahun 2017 berkurang sebesar Rp6.500.000,00 yang disetor pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp3.000.000,00 dengan No NTPN 0112150703100015, tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp2.000.000,00 dengan No

NTPN 1113070701030115 dan tanggal 14 September 2016 sebesar Rp1.500.000,00 dengan No NTPN F6FB4579KOMEM1P0 namun baru dijurnal balik pada Semester II Tahun 2017. Rincian Piutang Bukan Pajak tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Ditjen PPMD	950.000.000	-
Ditjen PKP2Trans	14.895.514	21.395.514
Jumlah	964.895.514	21.395.514

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Bukan Pajak
(Rp4.824.477)*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp4.824.477,00) dan (Rp106.978,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Tahun 2017 merupakan penyisihan atas piutang milik Ditjen PPMD dan Ditjen PKTrans yang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, dapat dilihat pada tabel berikut:

*Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang bukan pajak - per UKE-1
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016
Ditjen PPMD	(4.750.000)	-
Ditjen PKTrans	(74.477)	(106.978)
Total	(4.824.477,00)	(106.978,00)

C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

*Piutang Bukan
Pajak (netto)
Rp960.071.037*

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp960.071.037 dan

Rp21.288.536,00 adalah milik Ditjen PPMD dan Ditjen PKTrans yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya oleh satker. Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) berasal dari selisih Piutang Bukan Pajak (Bruto) dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.

Perbandingan Piutang Bukan Pajak Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto)
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Ditjen PPMD	945.250.000	-
Ditjen PKP2Trans	14.821.037	21.288.536
Jumlah	960.071.037	21.288.536

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp88.468.100,0
0*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp88.468.100,00 dan Rp88.468.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR

TA 2017 dan 2016

No	Nama	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bagian Lancar TP	88,468,100	88,468,100
2	Bagian Lancar TGR	0	0
	Jumlah	88,468,100	88,468,100

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.88.468.100,00 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai yang belum diselesaikan pada

tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar Rp88.468.100,00.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp442.338,00*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp442.338,00 dan Rp442.338,00. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar milik Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen PKTrans yang merupakan pengembalian perjalanan dinas. Estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar

TA 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	88.468.100	0,50%	442.338
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	88.468.100		442.338
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	88.468.100		442.338

C.8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR (Netto)
Rp88.025.762,00*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp88.025.762,00 dan Rp88.025.762,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang

akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar Rp88.468.100,00.

C.9 Persediaan

*Persediaan
Rp399.770.817.
759,00*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp399.770.817.759,00 dan Rp1.369.671.545.946,00 Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Persediaan yang berasal dari belanja MAK 526 yaitu Bantuan Pemerintah untuk diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah telah seluruhnya dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima. Satuan kerja lingkup KDPDTT telah menyelenggarakan Akuntansi Persediaan melalui aplikasi persediaan yang merupakan bagian dari aplikasi SIMAK BMN.

Posisi Persediaan per unit Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Persediaan per Unit Eselon I
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	31 Des 2017	31 Des 2016
067.02	Itjen	18,262,500	75.662.580
067.03	Ditjen PPMD	42,506,657,010	21.903.655.580
067.04	Ditjen PKP	145,823,167,388	499.459.048.143
067.05	Ditjen PDTu	100,212,622,594	361.181.928.715
067.06	Ditjen PDT	89,047,875,697	353.336.882.887
067.07	Ditjen PKP2TRans	13,312,253,624	74.944.610.791

067.08	Ditjen PKTRans	8,798,008,461	58.512.354.300
067.09	Balilatfo	48,505,355	54.877.650
067.10	Setjen	3,465,130	202.525.300
	JUMLAH	399,770,817,759	1.369.671.545.946

Mutasi tambah persediaan berasal dari pembelian yang merupakan realisasi belanja yang akan membentuk persediaan yaitu:

AKUN	NAMA AKUN	NILAI
5218	Belanja Barang Persediaan	28.825.411.255
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.482.242.000
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.067.590
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	609.334.037.703
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	292.995.260.300
	JUMLAH	935.775.018.848

Selain mutasi tambah karena pembelian, terdapat juga mutasi tambah karena koreksi otomatis dalam aplikasi persediaan yang disebabkan kenaikan harga persediaan sebesar Rp74.739.110.732,00

Mutasi kurang disebabkan karena pemakaian persediaan yang akan menjadi beban persediaan sebesar Rp50.190.499.909,00 Mutasi kurang yang disebabkan penyerahan barang persediaan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah yang berasal dari MAK 526 berupa Bantuan Pemerintah sebesar Rp1.863.226.884.993,00.

Selain mutasi kurang karena pemakaian dan penyerahan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, terdapat juga mutasi kurang karena koreksi otomatis dalam aplikasi persediaan yang disebabkan penurunan harga persediaan sebesar Rp62.085.161.610,00

ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset Tetap pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.498.357.517.119,00 dan Rp2.666.384.971.602,00. Rincian Aset Tetap terdiri dari:

*Rincian Aset Tetap
31 Desember 2017 dan TA 2016*

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2017	TA 2016	NAIK (TURUN) %
Tanah	120.992.735.697	136.523.334.174	(11,38)
Peralatan dan Mesin	331.245.725.328	313.652.551.221	5,61
Gedung dan Bangunan	330.387.908.090	576.038.877.297	(42,64)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	965.108.724.575	1.963.043.790.949	(50,84)
Aset Tetap Lainnya	212.537.171.053	311.138.739.396	(31,69)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.495.714.219	35.864.803.190	(31,70)
Akumulasi Penyusutan	(486.410.461.843)	(669.877.124.625)	(27,39)
Jumlah	1.498.357.517.119	2.666.384.971.602	(43,81)

C.10 Tanah

Tanah
Rp120.992.735.
697,00

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar dan Rp120.992.735.697,00 dan Rp136.523.334.174,00 Terdapat penurunan nilai aset Tanah pada TA 2017 sebesar Rp15.530.598.477,00 atau 11,38 persen.

Rincian aset Tanah per 31 Desember 2017 pada Unit Kerja Eselon 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tanah per Unit Eselon I
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	31 Des 2017	31 Des 2016	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Itjen	-	-	-	-
067.03	Ditjen PPMD	-	-	-	-
067.04	Ditjen PKP	-	-	-	-
067.05	Ditjen PDTu	-	-	-	-

067.06	Ditjen PDT	-	-	-	-
067.07	Ditjen PKP2TRans	-	7.464.058.477	(7.464.058.477)	-100
067.08	Ditjen PKTRans	-	8.066.540.000	(8.066.540.000)	-100
067.09	Balilatfo	506.179.801.000	99.394.984.338	406.784.816.662	409,26
067.10	Setjen	21.597.751.359	21.597.751.359	-	-
Koreksi atas Revaluasi		(406.784.816.662)	-	-	-
JUMLAH		120.992.735.697	136.523.334.174	15.530.598.477	-11,38

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada aset tetap berupa Tanah sebesar Rp(406.784.816.662,00) berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2017.

Rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Tanah
Periode TA 2017*

(dalam rupiah)

SALDO AWAL per 1 Januari 2017	136.523.334.174
MUTASI TAMBAH	0
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	430.027.000
Pembelian	0
MUTASI KURANG	0
Usulan Barang Hibah DK/TP/Aset Tetap	2.611.409.040
Penghentian Aset dari Pengguna	5.282.676.437
Reklasifikasi Keluar	8.066.540.000
SALDO AKHIR per 31 Desember 2017	120.992.735.697

Mutasi tambah karena adanya reklassifikasi dari aset lainnya ke aset tetap pada Disnakertrans Gorontalo sebesar Rp430.027.000

Mutasi kurang karena terdapat usulan Barang Hibah DK/TP/Aset Tetap Rp.2.611.409.040 pada 24 Satker di Ditjen PKP2Trans (rincian di laporan BMN Ditjen PKP2Trans).

Terdapat penghentian asset dari pengguna sebesar Rp5.282.676.437 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Penghentian aset dari pengguna Rp1.618.669.914 pada Satker Setditjen PKP2Trans, yang merupakan aset dari 75 Satker TP yang ditatausahakan pada Setditjen PKPTRans dalam rangka proses hibah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- Terdapat penambahan penghentian aset dari pengguna sebesar Rp3.664.006.523 yang merupakan mutasi aset tetap ke aset lainnya di 21 Satker TP Ditjen PKP2Trans dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Barang	Rupiah
1	350134 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Pidie	Tanah	133.850.000
2	350138 TP	Dinas Nakertrans Kab. Bener Meriah	Tanah	91.939.800
3	350159 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Sorolangun	Tanah	69.685.100
4	350196 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Kubu Raya	Tanah	136.910.000
5	350204 TP	Dinas Nakertransos Kab. Kapuas Hulu	Tanah	25.296.750
6	350217 TP	Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas	Tanah	117.200.000
7	350224 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Barito Timur	Tanah	104.575.000
8	350249 TP	Dinas Nakertrans Kab. Bulungan	Tanah	234.397.500
9	350271 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Morowali	Tanah	162.544.037
10	350288 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu Utara	Tanah	67.480.874
11	350289 TP	Dinas Nakertransos Kab. Luwu Timur	Tanah	176.663.637
12	350290 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Toraja Utara	Tanah	778.787.110
13	350304 TP	Dinas Nakertrans Kab. Konawe Selatan	Tanah	559.302.000
14	350307 TP	Dinas Nakertrans Kab. Konawe	Tanah	16.297.239
15	350309 TP	Dinas Nakertrans Kab. Konawe Utara	Tanah	116.604.051
16	350330 TP	Dinas Nakertrans Kab. Bima	Tanah	37.614.000
17	350386 TP	Dinas Nakertrans Kab. Kaur	Tanah	35.929.896
18	350393 TP	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah	Tanah	140.108.000
19	350396 TP	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Timur	Tanah	139.810.000
20	350432 TP	Dinas Nakertrans Kab. Teluk Wondama	Tanah	131.411.529
21	350471	Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi	Tanah	387.600.000
		Jumlah		3.664.006.523

Reklasifikasi keluar sebesar Rp8.066.540.000 terjadi pada Satker Disnakertrans Kab Kapuas karena bukan merupakan pembelian lahan melainkan pematangan lahan.

Aset Tanah pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebesar Rp120.992.735.697,- terdiri dari Tanah berupa Lahan sebagai kepemilikan kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Rincian Aset Tanah yang dimiliki Kementerian DPDT per 31 Desember 2017 sebesar Rp120.992.735.697,- dapat dilihat pada tabel berikut:

*Daftar Aset Tanah per Satker
Per 31 Desember 2017*

Dalam Rupiah

NAMA SATKER	Nilai
BALAI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNIK PRODUKSI – BENGKULU	172.830.565.000
BALAI BESAR PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA	18.104.285.000
BALAI BESAR PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA	67.449.446.000
BALAI PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR	62.956.953.000
BALAI PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN	41.464.500.000
BALAI PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DENPASAR	129.778.125.000
BALAI PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI PEKANBARU	13.595.927.000
SEKRETARIAT JENDERAL KDPDTT	21.597.751.459
Koreksi atas Revaluasi	(406.784.816.662)
JUMLAH	120.992.735.697

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada aset tetap berupa Tanah sebesar Rp(406.784.816.662,00)

Terdapat aset Tanah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dikuasai oleh pihak lain. Permasalahan Tanah ini pada satker Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu yaitu adanya sebidang tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu tanpa disertai kelengkapan dokumen yang jelas dengan luas tanah kurang lebih 220.000 m² (22 Ha) dan 2 unit rumah Negara Golongan II Type 36 dan 1 unit Rumah Negara Type II Barak Pekerja. Penggunaan tanah dan aset tanpa status penggunaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh Tim KPKNL Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 7 s.d 10 Oktober 2008 oleh satker lama (BP2TPK Bengkulu) pada saat masih berada dalam naungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian tersebut, UAKPB Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian Bengkulu telah mengirimkan surat kepada Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu dengan No. 82/BPPTP/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 untuk

mengkoordinasikan status penggunaan lahan dan aset berupa gedung/bangunan tersebut. Pihak UAKPB Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Ketransmigrasian Bengkulu juga mengirimkan kembali surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, No. 161/BPPTP/XI/2014 tanggal 26 November 2014 dimana isi surat tersebut meminta agar Dinas Perkebunan menghentikan kegiatan mulai tahun 2015.

Tanggapan dari Kepala Dinas Perkebunan melalui surat No.028/1105/8, tanggal 29 Desember 2014 dimana isi surat tersebut meminta agar BP2TPK Bengkulu memberikan tenggang waktu 5 tahun. Isi surat tersebut juga mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu agar lahan tersebut dapat dihibahkan kepada Dinas Perkebunan. Tetapi permintaan tersebut belum ada respon.

Pada tanggal 28 Januari 2015, Gubernur Bengkulu mengirimkan surat No. 590/067/DISBUN kepada Menteri Desa, PDT & Transmigrasi dimana surat tersebut berisi permohonan Hibah Lahan ADC seluas 22 Ha. Kemudian Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu tanggal 10 November 2015 mengirimkan surat No.249/BPPTP-BKL/XI/2015 kepada Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi, dimana isi surat tersebut menjelaskan bahwa lahan seluas 22 Ha yang dipakai oleh Dinas Perkebunan merupakan area yang masuk dalam revitalisasi penataan Balai. Proses revitalisasi tersebut melibatkan pihak Institut Pertanian Bogor sebagai mitra kerja pelaksanaan revitalisasi Balai. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi.

C.11 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp331.245.725.
328,00

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp331.245.725.328,00 dan Rp313.652.551.221,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp17.593.174.107,00 atau 5,61 persen.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPDT Per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

RINCIAN PERALATAN DAN MESIN MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017

Kode	Uraian	Jumlah
067.02	Inspektorat Jenderal	7,386,642,005.
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	11,959,468,117.
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	13,313,296,670.
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	12,679,806,056.
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	7,907,207,250.
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan	43,058,365,186.
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	38,143,817,780.
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,	84,270,321,283.
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	112,526,800,981.
JUMLAH		331,245,725,328.

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Periode Tahun 2017

Dalam Rupiah

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2016	313.652.551.221
Mutasi tambah:	376.051.487.329
Penambahan Saldo Awal	321.449.567.384
Pembelian	25.751.377.518

Penyelesaian Pembangunan Langsung	58.910.000
Penyelesaian Pembangunan KDP	4.577.314.800
Reklasifikasi Masuk	7.669.926.464
Transfer Masuk	4.049.284.274
Pembatalan Penghapusan	149.680.300
Perolehan Lainnya	12.102.502.300
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	35.909.666
Pengembangan Nilai Aset	139.700.000
Koreksi Pencatatan	67.314.623
Mutasi kurang:	358.458.313.222
Hibah Keluar	194.605.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	333.609.040.168
Reklasifikasi Keluar	7.436.477.764
Usulan Barang Hibah DK/TP	11.115.668.615
Koreksi Pencatatan	451.712.850
Transfer Keluar	4.029.284.274
Penghapusan	820.635.327
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	800.889.224
Saldo per 31 Desember 2017	331.245.725.328
Akumulasi Penyusutan	194.282.897.487
Nilai Buku per 31 Desember 2017	136.962.827.841

Mutasi tambah yang berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp376.051.487.329,00.

Mutasi Kurang terbesar pada penghentian aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yakni dikarenakan kondisi aset yang rusak berat sebesar Rp.333.609.040.168,00. Rincian penghentian aset pada masing-masing Eselon I terdiri dari:

Kode	Nama UKE 1	Jumlah
067.04	Ditjen PKP	306.232.428.834
067.05	Ditjen PDTu	16.263.628.780
067.06	Ditjen PDT	2.043.895.750
067.07	Ditjen PKP2Trans	1.725.463.746

067.08	Ditjen PKTrans	17.680.000
067.09	Balilatfo	2.722.960.942
067.10	Sekretariat Jenderal	4.602.982.116
	Total	333.609.040.168

C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp330.387.908.
090,00

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp330.387.908.090,00 dan Rp576.038.877.297,00. Terdapat penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp245,.650.969.207,00 atau 42,64 persen.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian DPDT Per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Eselon 1
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0
067.03	Ditjen PPMD	1.713.971.000	4.591.958.750	(2.877.987.750)	-62,67%
067.04	Ditjen PKP	0	0	0	0,00%
067.05	Ditjen PDTu	0	0	0	0,00%
067.06	Ditjen PDT	0	0	0	0,00%
067.07	Ditjen PKP2TRans	117.843.317.782	291.147.661.049	(173.304.343.267)	-59,52%
067.08	Ditjen PKTRans	62.801.361.795	147.981.971.851	(85.180.610.056)	-57,56%
067.09	Balilatfo	80.171.757.440	83.698.137.873	(3.526.380.433)	-4,21%
067.10	Setjen	65.943.252.955	48.619.147.774	17.324.105.181	35,63%
Koreksi atas Revaluasi		1.914.247.118			
JUMLAH		330.387.908.090	576.038.877.297	(245.650.969.207)	-42,64%

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.914.247.118,00 berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2017.

Adapun rincian mutasi/perubahan Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan
Periode TA 2017*

Dalam rupiah

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2016	576.038.877.297
Mutasi tambah:	73.719.978.950
Penambahan Saldo Awal	18.380.972.521
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.776.470.300
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	17.595.223.982
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	12.101.870.171
Reklasifikasi Masuk	526.986.000
Transfer Masuk	11.436.676.550
Pembatalan Penghapusan	2.394.141.000
Pengembangan Nilai Aset	5.316.148.606
Pengembangan Melalui KDP	2.395.400.120
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	323.084.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	287.296.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	185.709.700
Mutasi kurang:	319.370.948.157
Hibah Keluar	6.454.285.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	60.554.675.520
Reklasifikasi Keluar	852.165.000
Usulan Barang Hibah DK/TP	228.285.886.537
Koreksi Pencatatan	11.436.676.550
Transfer Keluar	11.436.676.550
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	350.583.000
Saldo per 31 Desember 2017	330.387.908.090
Akumulasi Penyusutan	35.697.915.518
Nilai Buku per 31 Desember 2017	294.210.089.690

Mutasi tambah yang berasal dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp73.719.978.950,00 :

Mutasi Kurang terbesar terdapat pada usulan Barang Hibah DK/TP senilai Rp228.285.886.537,00 yang terdapat pada masing-masing unit kerja Eselon I pada Ditjen PPMD sebesar Rp.2.877.987.750,00 Ditjen PKP2Trans sebesar Rp141.231.066.206,00 dan Ditjen PKTRans sebesar Rp84.176.832.581,00

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp965.108.724.975,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp965.108.724.975,00 dan Rp1.963.043.790.949,00. Terdapat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2017 sebesar Rp997.935.066.644,00 atau 50,84 persen.

Perbandingan rincian nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPDT Per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Tetap JIJ per eselon 1
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

Kode	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0
067.03	Ditjen PPMD	6.641.907.450	16.475.137.589	(9.833.230.139)	-59,69%
067.04	Ditjen PKP	0	0	0	0
067.05	Ditjen PDTu	0	0	0	0
067.06	Ditjen PDT	0	0	0	0
067.07	Ditjen PKP2Trans	422.924.332.131	899.307.980.038	(476.383.647.907)	-52,97%
067.08	Ditjen PKTRans	521.904.689.510	1.039.210.814.190	(517.306.124.680)	-49,78%
067.09	Balilatfo	9.564.820.746	7.823.142.132	1.741.678.614	22,26%
067.10	Setjen	226.717.000	226.717.000	0	0,00%
Koreksi Atas Revaluasi		3.846.257.738	0	3.846.257.738	#DIV/0!
JUMLAH		965.108.724.575	1.963.043.790.949	(997.935.066.374)	-50,84%

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.846.257.738,00 berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2017.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode TA 2017*

Dalam rupiah

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2016	1.963.043.790.949
<i>Mutasi tambah:</i>	381.860.568.962
Pembelian	9.341.700.000
Penambahan Saldo Awal	246.468.509.822
Penyelesaian Pembangunan Langsung	4.347.281.474
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	109.337.061.670
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	665.358.477
Reklasifikasi Masuk	39.851.000
Pengembangan Nilai Aset	1.671.714.000
Pengembangan Melalui KDP	6.737.919.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	1.687.381.000
Koreksi Pencatatan	1.563.792.519
<i>Mutasi kurang:</i>	1.379.795.634.936
Hibah Keluar	14.304.941.500
Penghentian Aset dari Penggunaan	420.935.931.870
Reklasifikasi Keluar	12.167.863.000
Usulan Barang Hibah DK/TP	931.807.906.203
Koreksi Pencatatan	558.638.685
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	20.353.678
Saldo per 31 Desember 2017	965.108.724.975
Akumulasi Penyusutan	238.312.806.499
Nilai Buku per 31 Desember 2017	726.795.918.076

Mutasi tambah yang berasal dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp381.860.568.962,00.

Mutasi kurang terbesar terdapat pada Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp931.807.906.203,00 yang terdapat pada masing-masing unit kerja Eselon I pada Ditjen PPMD sebesar Rp10.031.730.139,00, Ditjen PKP2Trans 419.562.118.244 dan Ditjen PKTrans sebesar Rp502.214.057.820

C.14 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya Rp212.537.171.
053,00-*

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp212.537.171.053,00 dan Rp311.138.739.396,00. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya pada TA 2016 sebesar Rp.98.601.568.343,00 atau 31,69 persen.

Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian DPDT Per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Tetap Lainnya per eselon 1
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

Kode	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	49.875.000	49.875.000	0	0,00%
067.03	Ditjen PPMD	446.003.690	404.643.690	41.360.000	9,27%
067.04	Ditjen PKP	466.516.450	466.516.450	0	0,00%
067.05	Ditjen PDTu	0	0	0	0,00%
067.06	Ditjen PDT	1.878.310.000	1.680.560.000	197.750.000	10,53%
067.07	Ditjen PKP2Trans	36.160.112.000	57.869.969.127	(21.709.857.127)	-60,04%
067.08	Ditjen PKTRans	148.313.119.949	225.723.306.045	(77.410.186.096)	-52,19%
067.09	Balilatfo	1.072.546.123	1.391.044.243	(318.498.120)	-29,70%
067.10	Setjen	24.150.687.841	23.552.824.841	597.863.000	2,48%
JUMLAH		212.537.171.053	311.138.739.396	(98.601.568.343)	-46,39%

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya
Periode TA 2017*

Dalam rupiah

URAIAN	KEMENTERIAN
Saldo per 31 Desember 2016	311.138.739.396
Mutasi tambah:	33.045.826.731
Penambahan Saldo Awal	4.400.000
Pembelian	44.219.525
Penyelesaian Pembangunan Langsung	859.069.000
Penyelesaian Pembangunan dg KDP	8.434.324.006
Reklasifikasi Masuk	23.518.104.500
Transfer Masuk	185.709.700
Mutasi kurang:	131.647.395.074
Hibah Keluar	325.179.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	29.922.200.747
Reklasifikasi Keluar	63.904.000

Usulan Barang Hibah DK/TP	100.964.691.927
Koreksi Pencatatan	185.709.700
Transfer Keluar	185.709.700
Saldo per 31 Desember 2017	212.537.171.053
Akumulasi Penyusutan	18.116.842.339
Nilai Buku per 31 Desember 2017	194.420.328.714

Mutasi tambah yang berasal dari realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp33.045.826.731,00 diuraikan sebagai berikut:

- Pembelian senilai Rp44.219.525,00
- Penyelesaian Pembangunan Langsung senilai Rp859.069.000,00
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP senilai Rp8.434.324.006 dan
- Terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan tetapi dicatat di Aset Tetap Lainnya senilai (Rp2.844.801.111,00)
- Terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tetapi dicatat di Aset Tetap Lainnya senilai (Rp81.623.575,00)
- Berasal dari KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai (Rp4.071.546.589,00)
- Berasal dari KDP Gedung dan Bangunan senilai (Rp1.573.847.731,00)
- Terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tetapi dicatat di Aset Lain-lain senilai Rp270.000.000,00
- Terdapat Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tetapi dicatat di Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp60.000.000,00

Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp210.275.409.049,00 dengan rincian per eselon I sebagai berikut:

Kode	Nama UKE 1	Jumlah
067.03	Ditjen PPMD	446.003.690
067.04	Ditjen PKP	466.516.450

067.06	Ditjen PDT	1.878.310.000
067.07	Ditjen PKP2Trans	35.955.517.600
067.08	Ditjen PKTrans	147.925.625.424
067.09	Balilatfo	329.984.044
067.10	Setjen	23.273.451.841
	Total	210.275.409.049

Aset Tetap Renovasi Ditjen PPMD dan Ditjen PKP per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp446.003.690,00 dan Rp466.516.450,00. ATR ini merupakan renovasi gedung/bangunan yang digunakan oleh Ditjen PPMD dan Ditjen PKP.

Aset tetap renovasi diatas masih tercatat sebagai aset tetap lainnya pada laporan keuangan Ditjen PPMD dan Ditjen PKP, dan belum dapat digabungkan ke aset induk karena gedung yang ditempati oleh Ditjen PPMD dan Ditjen PKP masih dalam proses alih status penggunaan BMN Kemendagri kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri an. Menteri Dalam Negeri Nomor : 011/4812/SJ tanggal 26 Agustus 2015 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi perihal Penggunaan Gedung Kantor Eks. Ditjen Dukcapil Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan.

Aset Tetap Renovasi Ditjen PDT per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.878.310.000,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.000.000,00 yang berlokasi di Jalan Abdul Muis No: 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Sekretariat Negara yang dipakai untuk pelaksanaan pemerintahan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sebesar Rp84.560.000,00 dan adanya penambahan Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PDT merupakan renovasi ruang tunggu tamu menjadi cafeteria. Pengerjaan renovasi tersebut sesuai dengan kontrak no. 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017 tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak Rp197.750.000.

Aset Tetap Lainnya pada Ditjen PKP2Trans terdapat pengurangan disebabkan adanya usulan Barang Hibah/DK/TP/Aset Tetap sebesar Rp12.686.040.000 yang merupakan Gedung dan Bangunan dalam renovasi sebesar Rp665.985.000 dan Jalan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi sebesar Rp12.020.055.000. Penghentian Aset dari penggunaan pada Aset Tetap Renovasi sebesar Rp14.536.821.127.

Aset Tetap Renovasi Balilatfo per 31 Desember 2017 sebesar Rp329.984.044,- adalah renovasi gedung BALAI BESAR PELATIHAN MASYARAKAT DESA, PDT DAN TRANS JAKARTA milik instansi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dipakai untuk operasional Balilatfo dan serahterimanya sedang dalam proses untuk dapat dikapitalisasi menambah nilai gedung milik BNP2TKI.

Terhadap Aset Tetap Renovasi (ATR) pada BBPLM sebesar Rp329.984.044 telah ditindak lanjuti dengan surat :

- a. Nota Dinas No.196/BALILATFO/03/2017 tanggal 29 maret 2017 yang ditujukan ke Inspektorat Jenderal.
- b. Nota Dinas No.219/BALILATFO/04/2017 tanggal 5 April 2017 yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal.
- c. Surat Sekretaris Jenderal No.444/SJ-KDPDTT/04/2017 tanggal 10 April 2017 hal Penyerahan Aset Tetap Renovasi ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Aset tetap renovasi Setjen per 31 Desember 2017 sebesar terdapat penambahan sebesar Rp597.863.000,- yakni renovasi gedung bangunan yang dipakai untuk operasional pemerintahan KDPDTT yang berlokasi di Jl Abdul Muis No 7 Jakarta Pusat. Aset tersebut merupakan aset milik Sekretariat Negara yang sedang dalam proses penyerahan.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp24.495.714.2
19,00,-*

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp24.495.714.219,00 dan Rp35.864.803.190,00. Terdapat penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2017 sebesar Rp11.369.088.971,00 atau 31,70 persen.

Perbandingan rincian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian DPDT Per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Tetap KDP per eselon 1
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

Kode	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0
067.03	Ditjen PPMD	0	0	0	-100
067.04	Ditjen PKP	0	0	0	0
067.05	Ditjen PDTu	0	0	0	0
067.06	Ditjen PDT	0	0	0	0
067.07	Ditjen PKP2TRans	2,741,157,904	22,092,698,400	(19,351,540,496)	-87.59%
067.08	Ditjen PKTRans	21,754,556,315	13,772,104,790	7,982,451,525	57.96%
067.09	Balilatfo	0	0	0	0
067.10	Setjen	0	0	0	0
JUM LAH		24,495,714,219	35,864,803,190	(11,369,088,971)	-31.70%

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Periode TA 2017*

Dalam rupiah

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2017	35.864.803.190
Mutasi tambah:	151.078.919.607
Penambahan Saldo Awal	-
Penambahan KDP	151.078.919.607
Mutasi kurang:	162.448.008.578
KDP Yang Menjadi Aset Definitif	162.448.008.578
Saldo per 31 Desember 2017	24.495.714.219

Terdapat KDP pada Laporan Keuangan Kemendesa PDTT dengan uraian sebagai berikut:

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi senilai Rp.21.754.556.315 dengan penjelasan pada per satuan kerja sebagai berikut :
 - 1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan perolehan tahun 2013 senilai Rp1.018.223.750, -(terjadi karena cuaca) Tahun Anggaran 2014 dianggarkan kembali untuk lanjutan pekerjaan tersebut, namun kena kebijakan pemotongan (Lokasi Sungai Bermas)
 - 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat saldo awal yang merupakan koreksi atas klarifikasi BPK Audited 2017 sebesar Rp12.142.712.000,00.
 - 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp. 4.182.594.000,- berupa aset tetap lainnya perolehan tahun 2012 senilai Rp. 2.179.522.000,- jalan, irigasi, dan jaringan perolehan tahun 2015 senilai Rp. 226.025.000,- jalan, irigasi, dan jaringan perolehan tahun 2016 senilai Rp.1.777.047.000,00. Tahun 2012 senilai Rp. 2.179.522.000,- pekerjaan pembangunan jembatan (bangunan atas) Sungai Ramdi tidak dapat diselesaikan, karena masih terdapat bangunan bagian bawah yang memerlukan tambahan tiang pancang, yang pada saat tersebut mobilisasi alat pemancang mengalami kesulitan memobilisi alat tersebut ke lokasi. Saat ini pihak daerah sedang melakukan review desain. Mengingat keterbatasan anggaran, untuk lanjutan pekerjaan jembatan tersebut tidak dapat dianggarkan kembali oleh

Ditjen PKTrans. Tahun 2015 senilai Rp226.025.000,- pekerjaan rehab jembatan lokasi Fida tidak dapat diselesaikan karena kendala pengaruh cuaca curah hujan yang tinggi sehingga mobilisasi alat dan material tidak dapat diteruskan, hingga akhir masa kontrak pekerjaan tidak terselesaikan, di tahun 2016 telah diselesaikan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp377.265.000,-. Tahun 2016 senilai Rp1.777.047.000,- terdiri dari : Rehab jalan poros lokasi Fida SP.6 sebesar Rp1.380.000.000,- karena penghematan anggaran. Rehab jembatan lokasi Fida SP.6 sebesar Rp377.265.000,- untuk menyelesaikan KDP tahun 2015 masih tercatat di KDP karena petugas BMN satker lupa mereklas menjadi aset definitive. Supervisi rehab gedung dan bangunan senilai Rp.19.782.000,- karena petugas BMN satker lupa mengkapitalisasi ke asset induknya sehingga masih tercatat di KDP.

2. Aset KDP Ditjen PKP2Trans per 31 Desember 2017 senilai Rp2.741.157.904,- merupakan selisih nilai KDP di tahun lalu sebesar Rp22.092.698.400,- yang telah menjadi aset definitif sebesar Rp19.351.540.496,- Rincian Aset KDP menurut usia adalah sebagai berikut:
 - 1) Dinas Sosnaker Kab. Pidie berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp. 116.592.000,- serta Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 848.475.113,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2015 dan terdapat penambahan KDP Tahun 2017 berupa gedung dan bangunan Rp123.000.000,- serta JIJ senilai Rp8.8945.887 di mana seluruh nilai tersebut sudah diselesaikan menjadi aset definitif;
 - 2) Dinas SosNakertrans Kab. Aceh Selatan berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp. 543.719.080,-

- serta Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 599.255.685,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2015;
- 3) Dinas SosNakertrans Kab. Sorolangun berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp. 560.965.120,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2014 dan telah diselesaikan menjadi aset definitif.
 - 4) Dinas Nakertrans Kab. Konawe utara berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp. 46.743.000,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2015;
 - 5) Dinas Nakertrans Kab. Kepulauan Sula berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp. 358.735.000,- serta Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 1.030.103.425,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2016 dan telah diselesaikan dan menjadi aset definitif Tahun 2017;
 - 6) Dinas Nakertransdukcapil Kab. Takalar berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 202.805.000,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2016;
 - 7) Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp. 246.500.000 serta Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 15.233.757.768,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2014 senilai Rp. 13.999.769.768,- dan pelaksanaan pekerjaan Tahun 2016 senilai Rp. 1.233.988.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan tahun 2016 pekerjaan gedung dan bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan telah diselesaikan menjadi aset definitive pada Tahun 2017;
 - 8) Sekretariat Direktorat Jenderal PKP2Trans memiliki saldo awal senilai Rp2.305.047.209 yang berasal dari perolehan likuidasi satuan kerja BA. 026.06 Ditjen PKP2Trans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari:
 - a. Dinas Nakertrans Kab. Bolaang Mongondow Timur berupa Gedung dan Bangunan serta

Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 1.006.415.470,-

- b. Dinas Nakertrans Kab. Lima puluh Kota senilai Rp.1.169.402.839,- pelaksanaan pekerjaan Tahun 2015, berupa KDP Tanah, KDP. Gedung dan KDP. Jalan Irigasi dan Jaringan;
- c. Dinas Nakertrans Kab. Sijunjung senilai Rp.129.228.900,- pelaksanaan pekerjaan tahun 2015, berupa KDP.Gedung dan KDP.Jalan.

Pada Tahun 2016 telah dianggarkan dari APBN pada Kab. Sijunjung dan Kab. Bolaang Mongandow Timur untuk melakukan peningkatan KDP tersebut menjadi aset definitif dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Sosnakertrans Kab. Sijunjung pada KDP Gedung Bangunan senilai Rp66.486.800 dan KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp62.742.100
- b. Dinas Kertrans Kab. Bolaang Mongandow Timur pada KDP Gedung Bangunan senilai Rp224.568.811 dan KDP Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp781.846.659
- d. Setelah dikapitalisasi menjadi aset definitif Sesditjen PKP2Trans pada Tahun 2017 menyerahterimakan ke Satker Dinas Kertrans Kab. Bolaang Mongandow Timur dengan BAST No B.839/DPKP2Trans.1/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dan Satker Dinas Sosnakertrans Kab. Sijunjung dengan BAST No B.838/DPKP2Trans.1/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tetapi pada Dinas Kertrans Kab Bolaang Mongandow Timur masih mencatat KDP senilai Rp781.846.659. Satker Dinas Kertrans Kab. Lima Puluh Kota belum dilakukan peningkatan KDP Menjadi Aset Definitif.

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp486.410.46
1.843,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing (Rp486.410.461.843,00) dan (Rp669.877.124.625,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	331,245,725,328	194,282,897,487	136,962,827,841
2	Gedung dan Bangunan	330,387,908,090	35,697,915,518	294,689,992,572
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	965,108,724,975	238,312,806,499	726,795,918,476
4	Aset Tetap Lainnya	212,537,171,053	18,116,842,339	194,420,328,714
Jumlah		1,839,279,529,446	486,410,461,843	1,352,869,067,603

C.17 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak
Berwujud
Rp7.775.495.65
4,00*

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp7.775.495.654,00 dan Rp6.860.302.507,00. Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp915.193.147,00 atau 13,34 persen.

Rincian Aset Tak Berwujud Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I
Tahun 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0
067.03	Ditjen PPMD	0	0	0	0
067.04	Ditjen PKP	0	0	0	0
067.05	Ditjen PDTu	714.190.000	0	714.190.000	(100)
067.06	Ditjen PDT	0	0	0	0
067.07	Ditjen PKP2TRans	0	0	0	0
067.08	Ditjen PKTRans	1.773.654.000	1.819.654.000	(46.000.000)	-2,53%
067.09	Balilatfo	3.570.241.654	3.593.238.507	(22.996.853)	-0,64%
067.10	Setjen	1.717.410.000	1.447.410.000	270.000.000	18,65%
JUMLAH		7.775.495.654	6.860.302.507	915.193.147	13,34%

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud
TA 2017*

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 5.844.599.904
2	ATB Lainnya	Rp 1.930.895.750
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 7.775.495.654

Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.775.495.654,00 menurut jenisnya pada Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I
Per 31 Desember 2017*

Dalam Rupiah

No	Satker	ATB Software	ATB Lainnya	Jumlah
1	Ditjen PDTu	714.190.000		714.190.000
2	Ditjen PKTrans	1.062.404.000	711.250.000	1.773.654.000
3	Balilatfo	2.999.595.904	570.645.750	3.570.241.654
4	Setjen	1.068.410.000	649.000.000	1.717.410.000
	Jumlah	5.844.599.904	1.930.895.750	7.775.495.654

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud
Tahun 2017

Dalam rupiah

URAIAN	NILAI
Saldo per 31 Desember 2016	6.860.302.507
Mutasi tambah:	1.001.790.000
Reklasifikasi Masuk	17.600.000
Pembelian	984.190.000
Mutasi kurang:	86.596.853
Penghentian Aset dari Penggunaan	68.996.853
Reklasifikasi Keluar	17.600.000
Saldo per 31 Desember 2017	7.775.495.654
Amortisasi	3.345.629.065
Saldo Buku per 31 Desember 2017	4.429.866.589

C.18 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp2.501.523.762.400,-

Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp2.501.523.762.400,00 dan Rp4.304.338.746.103,00. Aset Lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN. Terdapat penurunan nilai Aset Lain- Lain pada TA 2017 sebesar Rp1.802.814.983.703,- atau 41,88 persen.

Perbandingan rincian nilai Aset Lain- Lain yang dimiliki Unit Kerja Eselon 1 lingkup Kementerian DPDT Per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada berikut.

*Rincian Aset Lain- Lain per eselon 1
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

Dalam rupiah

Kode	Uraian	31-Dec-17	31-Dec-16	Naik/Turun	
				Nilai	%
067.02	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0,00
067.03	Ditjen PPMD	0	0	0	0,00
067.04	Ditjen PKP	245.050.913.841	514.406.683.834	(269.355.769.993)	-52,36%
067.05	Ditjen PDTu	373.204.505.920	1.282.241.504.696	(909.036.998.776)	-70,89%
067.06	Ditjen PDT	448.146.111.799	761.635.836.409	(313.489.724.610)	-41,16%
067.07	Ditjen PKP2TRans	1.090.850.757.231	1.308.605.567.544	(217.754.810.313)	-16,64%
067.08	Ditjen PKTRans	304.708.342.449	397.108.721.514	(92.400.379.065)	-23,27%
067.09	Balilatfo	6.174.148.906	7.328.758.736	(1.154.609.830)	-15,75%
067.10	Setjen	33.388.982.254	33.011.673.370	377.308.884	1,14%
JUMLAH		2.501.523.762.400	4.304.338.746.103	(1.802.814.983.703)	-41,88%

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Lain- Lain pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Mutasi/Perubahan Aset Lain- Lain
Periode TA 2017*

Dalam Rupiah

URAIAN	KEMENTERIAN
Saldo per 31 Desember 2016	4.304.338.746.103
Mutasi tambah:	335.902.665.908
Reklas dari Persediaan Bantuan Pemerintah untuk Pemda	47.167.144.125
Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	288.735.521.783
Mutasi kurang:	2.138.717.649.611
Usulan Barang Hibah DK/TP	517.906.390.807
Koreksi Pencatatan	2.327.917.473
Penghapusan BMN Yang Dihentikan	1.603.356.955.831
Reklasifikasi Keluar	15.126.385.500
Saldo per 31 Desember 2017	2.501.523.762.400
Akumulasi Penyusutan	963.858.970.889
Saldo Buku 31 Desember 2017	1.537.664.791.511

Selain itu terdapat mutasi tambah karena reclas dari aset tetap yaitu aset yang rusak berat di reclas ke aset lain-lain sebagai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp288.735.521.783,00.

Dari jumlah tersebut terdapat koreksi sebesar Rp3.664.006.523,00 yang merupakan mutasi aset tetap tanah ke aset lainnya di 21 Satker TP Ditjen PKP2Trans dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Nama Barang	Rupiah
1	350134 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Pidie	Tanah	133.850.000
2	350138 TP	Dinas Nakertrans Kab. Bener Meriah	Tanah	91.939.800
3	350159 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Sorolangun	Tanah	69.685.100
4	350196 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Kubu Raya	Tanah	136.910.000
5	350204 TP	Dinas Nakertransos Kab. Kapuas Hulu	Tanah	25.296.750
6	350217 TP	Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas	Tanah	117.200.000
7	350224 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Barito Timur	Tanah	104.575.000
8	350249 TP	Dinas Nakertrans Kab. Bulungan	Tanah	234.397.500
9	350271 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Morowali	Tanah	162.544.037
10	350288 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu Utara	Tanah	67.480.874
11	350289 TP	Dinas Nakertransos Kab. Luwu Timur	Tanah	176.663.637
12	350290 TP	Dinas Sosnakertrans Kab. Toraja Utara	Tanah	778.787.110
13	350304 TP	Dinas Nakertrans Kab. Konawe Selatan	Tanah	559.302.000
14	350307 TP	Dinas Nakertrans Kab. Konawe	Tanah	16.297.239
15	350309 TP	Dinas Nakertrans Kab. Konawe Utara	Tanah	116.604.051
16	350330 TP	Dinas Nakertrans Kab. Bima	Tanah	37.614.000
17	350386 TP	Dinas Nakertrans Kab. Kaur	Tanah	35.929.896
18	350393 TP	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah	Tanah	140.108.000
19	350396 TP	Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Timur	Tanah	139.810.000
20	350432 TP	Dinas Nakertrans Kab. Teluk Wondama	Tanah	131.411.529
21	350471	Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi	Tanah	387.600.000
		Jumlah		3.664.006.523

Pada Ditjen PKTrans terdapat reklassifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp81.195.139.399,00 dengan rincian sebagai berikut:

KODE SATKER	URAIAN SATKER	NILAI
350119	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KAB. ACEH UTARA	17.680.000
350168	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	1.916.582.600
350171	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR	15.126.385.500
350411	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANGKA SELATAN	333.538.755
350458	SEKRETARIAT DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	63.800.952.544
Jumlah Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya Pada Aset Lain Lain Per 31 Desember 2017		81.195.139.399

Pada Ditjen PKP masih terdapat asset lain-lain yang belum diusulkan untuk penghapusan senilai Rp245.050.913.841,00.

Mutasi Kurang Aset Lain-lain pada Ditjen PDTu merupakan transaksi penghapusan Barang Persediaan Berupa Bantuan Pemerintah untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang sudah diusulkan hibah ke Sekretariat Jenderal KDPDTT sebesar Rp957.840.592.131,00 yang sudah keluar Surat Persetujuan Hibah Sekretaris Jenderal KDPDTT selaku Pengguna Barang sebesar Rp175.017.313.075 dan sudah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebesar Rp 75.218.231.897,00. Terdapat Penghapusan BMN yang dihentikan sebesar Rp. 49.412.919.223,00 yang terdapat pada Satker Setditjen PKP2Trans di satker tidak operasional meliput Kab Balangan sebesar Rp7.904.990.390,00 Kab Tolitoli sebesar Rp8.875.205.633,00 Kab. Tojo Una-Una sebesar Rp10.932.188.000 dan Kab. Bellu sebesar Rp21.700.535.200,00.

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp967.209.424
.954,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp967.209.424.954,00) dan (Rp1.107.752.966.203,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	ATB Software Kompu	5.844.599.904	(3.350.454.065)	9.195.053.969
2	ATB Lainnya	1.930.895.750	-	1.930.895.750
	Jumlah	7.775.495.654	(3.350.454.065)	11.125.949.719
3	Aset Lain-lain	2.501.523.762.400	(963.858.970.889)	3.465.382.733.289
	Jumlah	2.509.299.258.054	-967.209.424.954	3.476.508.683.008

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp6.611.032.90
7,-*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.611.032.907,00 dan Rp11.068.690.443,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.22 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp18.938.471,0
0.*

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing - masing sebesar Rp 18.938.471,00 dan Rp222.396.599,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 per satker dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian uang Muka per satker
Per 31 Desember 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Nama Satker	Jumlah
067.03.350150	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT	8.976.970

067.07.419107	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUNA BARAT	3.181.501
067.08.350318	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALUKU TENGAH	1.300.000
067.08.350487	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TOLI-TOLI	5.480.000
	JUMLAH	18.938.471

C.22 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp1.182.408,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.182.408,00 dan Rp116.636,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara terdapat pada Ditjen PPMD.

C.23 Ekuitas

Ekuitas
Rp3.434.655.232.448,00

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.434.655.232.448,00 dan Rp7.228.543.249.511,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan

Pendapatan
Rp2.396.995.59
6,00

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.396.995.596,00 dan Rp5.087.576.605,00.

Rincian Pendapatan Tahun 2017 dan 2016 per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan per jenis pendapatan
Per 31 Desember 2017*

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	Nilai
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Rp 560.284.715
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 1.301.089.443
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 41.250.000
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Rp 74.812.323
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	Rp 9.938.147
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp 400.621.335
423753	Pendapatan Denda Administrasi PBHTB	Rp 5.605.955
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 3.393.678
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2016		Rp 2.396.995.596

Adapun Rincian Pendapatan Tahun 2017 per eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan per jenis Eselon I
Per 31 Desember 2017*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	31 Des 2017
067.02	Itjen	43
067.03	Ditjen PPMD	196.006.191
067.04	Ditjen PKP	156.387.921
067.05	Ditjen PDTu	62.563.815
067.06	Ditjen PDT	121.564
067.07	Ditjen PKP2Trans	42.505.812
067.08	Ditjen PKTRans	27.137.830
067.09	Balilatfo	560.284.715
067.10	Setjen	1.351.987.705
	JUMLAH	2.396.995.596

*Beban Pegawai
Rp208.337.577.
246,00*

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp208.337.577.246,00 dan Rp209.511.238.848,00.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 per jenis Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian jenis Beban Pegawai
TA 2017 dan TA 2016*

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
511111	Beban Gaji Pokok PNS	82,668,910,773	83,838,781,704
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-53,107,500	-29,856,700
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,086,409	1,067,157
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-7,186	-13,240
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-7,702,740	-855,860
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	5,594,371,214	5,628,629,054
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,334,714,807	1,402,208,934
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,934,660,000	10,304,040,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-19,500,000	-13,095,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-2,405,000	-10,165,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,688,985,000	2,537,255,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	566,257,340	1,646,128,906
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,770,817,950	3,883,713,060
511129	Beban Uang Makan PNS	10,581,546,400	11,456,829,914
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	-26,736,200
511147	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	14,443,800
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,120,603,410	8,422,856,410
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-522,704,572	-422,477,585
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	183,750,000	175,112,870
512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	-6,192,950	-598,500
512211	Beban Uang Lembur	14,746,387,384	14,135,765,686
512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-975,638,605	-2,438,288,642
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	70,732,745,112	69,006,493,080.
JUMLAH		208.337.577.246	209.511.238.848

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 menurut Unit Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Pegawai per Eselon I
TA 2017 dan TA 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	2017	2016
067.02	Inspektorat Jenderal	15.930.063.451	-
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.747.376.617	15.277.453.734
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	13.806.344.893	11.917.409.350
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	13.753.408.686	13.932.933.728
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	13.950.260.441	10.462.958.418
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	31.988.934.435	33.054.963.630
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	25.600.975.917	28.203.155.623
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	48.121.140.614	24.823.761.766
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	35.439.072.192	71.838.602.599
JUMLAH		208.337.577.246	209.511.238.848

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp30.757.714.036,00 dan Rp68.562.192.376,00.

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun TA 2017 dan 2016

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
593111	Beban Persediaan konsumsi	30.516.016.210	41.761.393.121
593112	Beban Persediaan amunisi		4.500.000
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	21.914.000	30.153.000
593131	Beban Persediaan bahan baku	46.181.026	4.237.239.712
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	18.255.113.073
593149	Beban Persediaan Lainnya	173.602.800	4.273.793.470
JUMLAH		30.757.714.036	68.562.192.376

Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada Tahun 2017

dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Perbandingan Beban Persediaan per Eselon I
TA 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
067.02	Inspektorat Jenderal	2,629,802,950	3,204,505,715
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3,766,225,270	2,960,359,398
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	3,131,387,712	7,646,163,725
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	1,809,182,750	4,326,292,150
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	4,331,421,190	3,472,694,700
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	1,811,562,719	2,681,268,506
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3,413,233,893	30,728,474,219
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	1,350,771,566	6,585,325,326
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	8,514,125,986	6,957,108,637
JUMLAH		30.757.714.036	68.562.192.376

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2.218.784.02
9.453,00*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.218.784.029.453,00 dan Rp2.143.161.051.241,00

Rincian beban barang dan jasa per jenis beban tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut

*Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun
TA 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	2017	2016
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	- 12,777,622.	-19,995,200.
521111	Beban Keperluan Perkantoran	41,547,285,728.	50,424,019,030.
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	0.	1,880,000.
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	160,763,000.	84,746,000.
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	752,153,697.	488,054,307.

521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38,335,908,430.	53,367,937,325.
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-50,387,500.	-150,065,600.
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13,265,909,150.	22,104,734,645.
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-124,814,312.	0
521211	Beban Bahan	112,820,867,439.	92,368,897,981.
521211	Pengembalian Beban Bahan	-13,674,000	0
521212	Beban Barang Transito	4,000,000.	0
521213	Beban Honor Output Kegiatan	41,997,843,500.	43,858,985,780.
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	-55,579,500.	-36,713,130.
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	153,213,670,406.	136,442,927,352.
521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-1,766,936,033.	-108,806,891.
522111	Beban Langganan Listrik	7,735,486,856.	7,749,939,338.
522112	Beban Langganan Telepon	437,046,157.	467,181,142.
522113	Beban Langganan Air	424,476,900.	547,308,420.
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,389,862,365.	5,074,609,655.
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	21,290,565.	6,396,705.
522131	Beban Jasa Konsultan	186,431,750,614	1,142,453,933,101
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-27,819,000.	-392,362,590.
522141	Beban Sewa	46,153,631,260.	58,114,268,612.
522141	Pengembalian Beban Sewa	-22,468,182	0
522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	-81,882,858.	-30,645,000.
522151	Beban Jasa Profesi	46,754,716,250.	99,347,438,093.
522191	Beban Jasa Lainnya	1,525,792,475,506.	431,116,771,662.
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-412,535,163.	-152,051,996.
525112	Beban Barang	0.	3,000,000.
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	0.	0
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	53,765,800.	18,685,000.
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0.	9,977,500.
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	60,000,000	0
JUMLAH		2.218.784.029.453	2.143.161.051.241

Rincian Beban Barang dan Jasa menurut BA dan Eselon 1
Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian beban Barang dan Jasa menurut Unit Eselon I
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	2017	2016
067.01	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	0	0
067.02	Inspektorat Jenderal	13,259,856,264	14,325,439,660
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,727,032,724,123	1,471,061,120,352
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	70,026,625,966	73,845,990,148
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	40,504,676,727	62,239,447,005
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	46,859,804,393	80,284,902,902
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	59,714,532,876	119,590,482,874
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	41,839,658,706	87,034,671,159
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	77,158,258,736	63,987,626,472
067.10	Sekretariat Jenderal Desa, PDT dan Transmigrasi	142,387,891,662	170,791,370,669
JUMLAH		2,218,784,029,453	2,143,161,051,241

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp37.580.345.8
94,00*

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp37.580.345.894,00 dan Rp42.440.023.517,00

Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2017 menurut akun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun
TA 2017*

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	Jumlah
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,086,876,533
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	680,943,450
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,521,273,402
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351,055,250
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	184,752,000
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1,156,204,374

523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	351,921,525
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	96,274,160
593114	Beban Persediaan suku cadang	151,045,200
JUMLAH		37.580.345.894

Sedangkan perbandingan Beban Pemeliharaan menurut BA dan Eselon 1 Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Beban Pemeliharaan per Unit eselon I
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	2017	2016
067.02	Inspektorat Jenderal	648,362,382	688,896,953
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	573,972,430	279,562,194
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	4,876,256,038	1,359,591,151
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	1,086,724,181	2,323,839,910
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	328,253,936	138,939,000
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	2,973,679,761	3,355,184,958
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2,505,762,873	4,128,015,356
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	9,323,607,950	8,280,918,562
067.10	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA,PDT, DAN	15,263,726,343	21,885,075,433
JUMLAH		37.580.345.894	42.440.023.517

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
595.672.353.87
0,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 595.672.353.870,00 dan Rp 481.726.403.174,00 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel berikut

*Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun
TA 2017 dan TA 2016*

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	TA. 2017	TA. 2016
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-4,617,615,299.	-1,889,517,744.
524111	Beban Perjalanan Biasa	260,230,544,098	252,528,474,127.
524112	Beban Perjalanan Tetap	0	15,400,000.
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,705,971,010.	5,527,860,000.
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-900,000.	-900,000.
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	205,566,790,154.	162,305,136,812.
524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-2,498,730,398.	-1,173,453,872.
524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-715,870,507.	-88,418,329.
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131,971,674,780	62,032,267,638.
524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	-485,093,700.
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	195,301,382	1,837,752,342.
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	835,188,650	1,116,895,900.
JUMLAH		595.672.353.870	481.726.403.174

Sedangkan perbandingan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 menurut BA dan Eselon 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Beban Perjalanan Dinas menurut Eselon I
Tahun 2017 dan 2016*

Dalam Rupiah

Kode	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
067.01	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	0	0
067.02	Inspektorat Jenderal	21,959,300,792	18,293,511,500
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	270,275,872,515	151,291,351,599
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	38,284,935,390	32,858,371,224
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	39,005,402,172	33,052,872,689
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	42,257,725,673	34,738,901,256
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	44,386,765,953	58,675,571,937
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	26,990,067,086	52,203,551,215

067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	55,001,324,121	35,885,965,356
067.10	Sekretaris Jenderal Keenterian Desa, PDT dan Transmigrasi	57,510,960,168	64,726,306,398
JUMLAH		595.672.353.870	481,726,403,174

Terdapat selisih Rp15.428.400,00 antara beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan adanya jurnal umum dari Tunggakan Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan sinkronisasi Program Pembangunan sarana dan prasarana Embung Desa Tahun Anggaran 2017.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp1,882,412,351,506

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1,882,412,351,506 dan Rp 4,176,035,068,711. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah menurut jenis akun tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda per akun Tahun 2017

Dalam Rupiah

Akun	Uraian	Jumlah
526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	160,330,069,937.
526112	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	253,975,521,535.
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	185,500,000.
526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	370,466,764,644.
526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	38,374,231,484.
526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	7,200,000,000
526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	742,465,682,093.
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik	290,233,848,000.
526312	Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	-4,732,700
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	19,185,466,513.
JUMLAH		1,882,412,351,506.

Sedangkan rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN
KEPADAMASYARAKAT MENURUT
BA/ES1/WIL/SATKER
TAHUN 2017 DAN 2016**

Kode	Uraian	2017	2016
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	306,486,259,700,	338,770,955,949
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	506,659,048,143	958,278,072,750
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	361,181,928,715	972,505,754,076
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	353,334,925,887	1,468,144,204,742
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	187,303,526,803	254,985,646,117
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	167,421,787,258	183,350,435,077
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	24,875,000	0
JUMLAH		1,882,412,351,506.	4,176,035,068,711

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp0,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.837.000,00. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada tahun 2017 tidak memiliki anggaran yang berasal dari anggaran Bantuan Sosial.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp398.394.930.595,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp398.394.930.595,00 dan Rp552.026.450.465,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Menurut Akun TA 2017*

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017**

Akun	Uraian	Jumlah
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73,627,081,479
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,986,059,252
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	94,416,078,071
591312	Beban Penyusutan Irigasi	11,147,243,534
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,259,866,585
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	814,917,018
592115	Beban Amortisasi Software	587,128,976
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	206,556,555,680
JUMLAH		398.394.930.595

Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut :

**RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
MENURUT BA/ES1/SATKER
Per 31 Desember 2017 dan 2016**

Kode	Uraian	2017	2016
067.02	Inspektorat Jenderal	1,313,598,250	1,206,762,934
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2,149,746,988	1,617,590,195
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	58,812,762,615	70,531,670,389
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	57,833,391,623	83,185,582,841
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	72,355,708,188	90,385,524,958
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan	91,209,672,988	143,921,533,407
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	81,440,850,245	118,334,862,331
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,	15,047,179,673	15,392,272,187
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	19,302,977,674	27,450,651,223
Koreksi Atas Revaluasi		(1.070.957.649)	
JUMLAH		398.394.930.595	552.026.450.465

Terdapat Koreksi atas Revaluasi pada Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp(1.070.957.649,00) berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2017.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp4.824.477,00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.824.477,00 dan Rp46.163.025,00 dengan rincian sebagai berikut.

**RINCIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

Kode	Uraian	TA.2017	TA.2106
067.03	Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,750,000	0
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	74,477.	46,163,025
JUMLAH		4,824,477,00.	46,163,025.

D.11. KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
(Rp2.666.156.2
39.692,00)*

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2017 dan TA 2016*

(Dalam Rupiah)

Uraian	2017	2016	% Naik/ Turun
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non lancar	(2.696.346.959.672)	(369.059.483.834,00)	631
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	462.370.000	188.700.000,00	145
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2.696.809.329.672	369.248.183.834,00	630
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	30.190.719.980	39.675.097.951,00	(24)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	92.276.244.090	296.957.530.311,00	(69)
Beban dari Kegiatan Non Operasional L	(62.085.524.110)	(257.282.432.360,00)	(76)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.666.156.239.692)	(329.384.385.883,00)	709

D.12. POS LUAR BIASA

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pada TA. 2017 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tidak memiliki Pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp7.228.543.249.511,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.228.543.249.511,00 dan Rp7.377.127.265.933,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
(Rp8.035.703.371.173,00)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar (Rp8.035.703.371.173,00) dan Rp(Rp7.997.809.228.635,00).

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset (Rp0,00)

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp3.164.869.163,00). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Rincian Penyesuaian Nilai Aset menurut Akun adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENYESUAIAN NILAI ASET MENURUT AKUN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017

Akun	Uraian	2017	2016
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(3.164.869.163)
	JUMLAH	0	(3.164.869.163)

Sedang Penyesuaian Nilai Aset menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN PENYESUAIAN NILAI ASET MENURUT BA/ES1
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017**

Kode	Uraian	2017	2016
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa	0	5.956.450
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	0	(589.601.200)
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	0	(2.580.861.963)
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	0	(362.450)
JUMLAH		0	(3.164.869.163)

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp5.216.650.987,00*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.216.650.987,00 dan Rp120.498.771.191,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan menurut Akun adalah sebagai berikut:

**RINCIAN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN MENURUT
AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017**

Akun	Uraian	2017	2016
391113	Koreksi Nilai Persediaan	5.216.650,987	120.498.771.191
JUMLAH		5.216.650,987	120.498.771.191

Sedang Penyesuaian Nilai Aset menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN MENURUT
BA/ES1
TAHUN 2017 DAN 2016**

Kode	Uraian	2017	2016
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	2.584.302.075
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan	0	22.553.797.405

	Perdesaan		
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	5.216.648.987	100.377.285.164
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	0	-5.174.808.928
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.000	158.195.475
JUMLAH		5.216.650.987	120.498.771.191

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp60.901.552.8
96,00*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp60.901.552.896,00 dan Rp1.790.921.469.119,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menurut Akun adalah sebagai berikut:

RINCIAN KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI MENURUT AKUN TAHUN 2017 DAN 2016

Akun	Uraian	2017	2016
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60.919.152.896	1.794.285.531.641
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-17.600.000	-3.364.062.522
JUMLAH		60.901.552.896	1.790.921.469.119

Sedang Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI
MENURUT BA/ES1
TAHUN 2017 DAN 2016**

Kode	Uraian	2017	2016
067.02	Inspektorat Jenderal	-	10
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-161.695.460	-467.339.577
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	-4.665.335.059)	479.823.701.729
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	41.435.521.930	831.566.680.577
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	0	547.226.006.849
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	12.350.427.504	-14.771.531.494
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	9.120.707.557	-54.977.337.077
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	425.430.179	-2.827.864.563
067.10	Sekretariat Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	2.396.496.245	5.349.152.665
JUMLAH		60.901.552.896	1.790.921.469.119

E.3.6 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
Rp1.577.514.590,00*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp1.577.514.590,00 sebesar dan Rp201.550.714.414,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

**RINCIAN LAIN-LAIN MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016**

Akun	Uraian	2017	2016
391119	Koreksi Lainnya	1,577,514,590	201.554.640.414
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	0	(3.926.000)
JUMLAH		1,577,514,590	201.550.714.414

Sedang Koreksi Lain-Lain menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN LAIN-LAIN MENURUT BA/ES1
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017**

Kode	Uraian	2017	2016
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,494,703,606	7.368.915.228
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	-	194.191.206.719
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	58,001,006	(2.690.671)
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	24,809,978	(2.790.862)
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	-	(3.926.000)
JUMLAH		1.577.514.590	201.550.714.414

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp4.174.119.635.637,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.174.119.635.637,00 dan Rp5.739.419.135.652,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS MENURUT AKUN

TAHUN 2017 DAN 2016

Akun	Uraian	2017	2016
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	4,182,348,770,554	5,815,879,037,784.
313121	Diterima dari Entitas Lain	-20,305,076,219	-44,997,050,753.
313211	Transfer Keluar	-12,305,643,913	-103,045,076,445.
313221	Transfer Masuk	12,323,760,472	71,582,225,066.
391131	Pengesahan Hibah Langsung	12,057,824,743	-
JUMLAH		4,174,119,635,637	5,739,419,135,652.

Terdapat selisih antara Transfer Masuk dengan Transfer Keluar sebesar (Rp18.116.559,00) terdapat pada 3 (tiga) UKE-1 yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen PKP2Trans

dan PKTrans. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan pencatatan berupa kurang catat, belum tercatat di aplikasi persediaan tetapi sudah dicatat di aplikasi penerimaan Transfer Masuk, dan adanya Transfer Keluar yang seharusnya diterima (Transfer Masuk) oleh Satker Lain. Rincian selisih antara Transfer Masuk dengan Transfer Keluar sudah dijelaskan pada CALK masing-masing Unit Kerja Eselon 1.

Sedang Transaksi Antar Entitas menurut BA dan Eselon 1 adalah sebagai berikut:

**RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
MENURUT BA/ES1/WIL/SATKER
TAHUN 2017 DAN 2016**

Kode	Uraian	2017	2016
067.01	Kementerian PDT	-49.360.200	-
067.02	Inspektorat Jenderal	48,408,887,965	38,184,152,503
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,347,094,873,355	2,013,167,987,724
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	285,227,808,181	636,524,996,522
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	192,933,415,904	618,060,129,808
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	196,145,280,315	520,752,350,577
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman	332,643,568,752	584,835,569,207
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	290,523,767,884	790,996,801,201
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Serta	192,720,272,590	156,369,030,483
067.10	Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	288,471,120,891	380,528,117,627
JUMLAH		4,174,119,635,637	5,739,419,135,652

*Ekuitas Akhir
Rp3.434.655.23
2.448,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.434.655.232.448,00 dan Rp7.228.543.249.511,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**F.1 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN****Direktorat Jenderal PPMD**

Terdapat Penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang lalu sebesar Rp 404.355.050 sebagai berikut

1. Satker Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 369.252.800 disebabkan dana tersebut ada pengembalian Bansos GSC tahun anggaran 2012 untuk kecamatan lunyuk BLM sebesar Rp 364.250.000,00 dan bunga bank dari dana BLM sebesar Rp5.002.800,00.
2. Satker Kabupaten Lembata Sebesar Rp32.877.000 disebabkan Temuan penyalahgunaan dana BLM Tahun Anggaran 2013. Penyimpangan Bendahara pakai uang untuk keperluan pribadi tetapi sudah dikembalikan dan disetor Kas Negara sebesar Rp 32.877.000,00.
3. Satker Kabupaten Landak sebesar Rp1.475.250 sisa penyaluran dan pemanfaatan BLM Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 hal ini disebabkan di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pararel pada tahun 2016 sehingga terdapat sisa dana yang tidak bisa dimanfaatkan maka harus dikembalikan ke Kas Negara. Rincian dana BLM yang tidak termanfaatkan, sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kuala Behe, setor Kas Negara sebesar Rp 925.000,00 dengan rincian :
 - 1). DOK peren Tahun 2014 Rp178.500,00
 - 2). DOK Pelmes Tahun anggaran 2014 Sebesar Rp 746.550,00
4. Satker Kabupaten Minahasa Utara Sebesar Rp750.000.000,00 disebabkan terdapat penyimpangan/penyalahgunaan dana kegiatan Non Multi pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang disalurkan ke PK Desa Aer Banua tidak sepenuhnya dibelanjakan dan diberikan kepada pemanfaat tapi

disalah gunakan oleh ketua PK a/n. James. Ketika di tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2014 pengelolaannya di kementerian dalam negeri lalu di tahun anggaran 2016 terdapat pengembalian dana senilai Rp750.000,00. Bukti setor dengan NTPN No CC54B02VHMAVI2UF tanggal 15 November 2017.

Direktorat Jenderal PKP

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK -RI Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Terkait Program PKKPM berupa bantuan dalam bentuk uang (sesuai PMK-173/PMK.05/2016) untuk 183 Kecamatan. PPK terkait telah melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut untuk 173 Kecamatan senilai Rp372.000.000.000,00. Sedangkan sisanya untuk 10 Kecamatan dengan nilai sebesar Rp20.000.000.000,00 masih dalam proses pengumpulan bukti.
- b. Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.099.202.379,11 dan sudah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.294.209.947,00 dan sisanya sebesar Rp804.992.432,11 masih dalam proses.
- c. Terkait denda keterlambatan sebesar Rp25.706.000,00 dan sudah disetor ke Kas Negara Rp25.695.000,00 dan kekurangan Rp11.000 sudah dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2017.
- d. Terkait kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.104.800.000 dan sudah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.104.800.000.
- e. Sudah dilakukan *stock opname* persediaan
- f. Sudah dilakukan inventarisasi aset Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- g. Sudah dilakukan inventarisasi aset Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Direktorat Jenderal PDTu

Kejadian setelah tanggal neraca 31 Desember 2017 yakni terdapat pekerjaan yang telah disetujui untuk diselesaikan pada tahun 2018 sebesar Rp15.109.836.430,00, merupakan sisa pekerjaan tahun anggaran 2017 yang belum selesai dikerjakan, dan sudah dianggarkan didalam DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-067.05.1.350455/2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja/Eselon II	Uraian Kegiatan	Nilai (Rp)
a.	Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan	Pembangunan Sarana Sarana Air Bersih Kabupaten Belu	1.309.840.000
		Pembangunan Jalan Sirip Wilayah Perbatasan di Kabupaten Malaka	1.945.235.200
		Pembangunan Jalan Sirip Wilayah Perbatasan di Kep. Aru	1.837.200.000
		Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Alor	911.641.000
		Pembangunan Sarana Air Bersih Kabupaten Kapuas Hulu	1.529.826.400
		Pembangunan Sarana Air Bersih di Kabupaten Kupang	418.743.600
		Pembangunan Sarana Air Bersih di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1.016.400.000
		Pembangunan Jalan Sirip Wilayah Perbatasan di Kabupaten Supiori	2.811.298.000
		Pembangunan Jalan Sirip Wilayah Perbatasan di Kabupaten Bengkayang (Lelang)	2.990.320.000
b.	Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan	Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya dan Peralatan Pasca Panen Paket II di 3 (Tiga) Kabupaten Yakni Kab. Aceh Singkil, Kab. Lombok Timur dan Kab. Timor Tengah Selatan	145.002.230
c.	Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar	Pembangunan Gudang Rumput Laut di Kabupaten Kepulauan Aru	194.330.000
TOTAL			15.109.836.430

BALILATFO

Hibah pada Pekanbaru

- Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Pekanbaru telah melakukan hibah ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 20 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara No. BAST 1423/BLM-PB/12/2017 dan No: 98/BAST/2017. Rincian aset dihibahkan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Aset BMN	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	767.280.000
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	20.794.000
3	Mess/Wisma	268.671.000
4	Pagar Permanen	48.670.000
5	Pagar Permanen	74.287.000
Jumlah		1.179.702.000

Hibah AC dan Gedung dalam Renovasi dilakukan pada tanggal 27 Desember 2017 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara No. BAST 1424/BLM-PB/12/2017 dan No: 100/BAST/2017 dengan rincian aset yang dihibahkan sebagai berikut:

No.	Aset BMN	Jumlah
1	Air Conditioner (AC)	102.575.000
2	Rak Besi (Rangka AC)	3.000.000
3	Gedung Bangunan dalam Renovasi	325.179.000
Jumlah		430.754.000

Gedung yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau merupakan ex kantor lama Balai Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Trans Pekanbaru lama yang terletak di jalan Adisucipto No.284, Pekanbaru.

- b. Pada BP2TP Bengkulu terdapat permasalahan terkait tanah yang dikuasai/ditatusahakan oleh pihak ketiga yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu tanpa disertai kelengkapan dokumen penggunaan yang jelas seluas 22 Ha yang diatasnya terdapat pula 2 (dua) unit Rumah Negara Golongan II Type 36 dan 1 (satu) unit Rumah Negara Type II Barak Pekerja. BP2TP Bengkulu telah mengirimkan surat kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Nomor 82/BPPTP/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 untuk mengkoordinasikan status penggunaan lahan dan aset berupa tanah serta gedung/bangunan tersebut dan ditindaklanjuti dengan

mengirimkan surat kembali kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dengan Nomor 161/BPPTP/XI/2014 tanggal 26 November 2014 yang isinya meminta agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu menghentikan kegiatannya mulai tahun 2015. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kemudian menanggapinya melalui surat Nomor 028/1105/8 tertanggal 29 Desember 2014 yang isinya meminta agar BPPTP Bengkulu memberikan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun dan mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu meminta agar lahan tersebut dihibahkan. Permintaan tersebut belum mendapatkan respon. Kemudian Gubernur Bengkulu menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat Nomor 590/067/DISBUN tanggal 28 Januari 2015 kepada Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI yang isinya tentang permohonan Hibah Lahan ADC seluas 22 Ha.

Menanggapai permintaan tersebut Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI telah menolak. Penolakan ini kemudian ditindaklanjuti melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2856/SJ-KPDDT/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang isinya meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu untuk menyerahkan lahan yang saat ini mereka manfaatkan.

Penggunaan tanah dan gedung/bangunan tanpa status penggunaan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh Tim KPKNL Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 10 Oktober 2008 oleh satker lama (BP2TPK Bengkulu) dan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh TIM KPKNL Bengkulu tanggal 28 November 2017.

- c. Pada tahun 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi telah melakukan

penghapusan dengan cara pemusnahan dan lelang. Rincian satker yang melakukan penghapusan adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SATKER	TAHUN PEROLEHAN	JENIS USULAN	USULAN PENGHAPUSAN	YANG DISETUJUI			KETERANGAN
					Tanggal Surat	No. Surat	Nilai	
1	BLM Denpasar	Setelah Tahun 1985	Lelang	339.473.700	26 September 2017	S.964/M-DPDTT/SJ/09/2017	4.170.000	Sellesai Sesuai SK
2	BBLM Yogyakarta	Setelah Tahun 1983	Lelang	321.903.037	26 September 2017	S.1170/M-DPDTT/SJ/11/2017	11.200.000	Selesai
3	BBPLM Jakarta	Setelah Tahun 1980	Pemusnahan	2.108.302.573	27 Desember 2017	S.1315/M-DPDTT/SJ/12/2017	464.999.307	Selesai
4	PUSLITBANG	Setelah Tahun 1983	Pemusnahan	462.772.400	25 Agustus 2017	S.760/M-DPDTT/SJ/08/2017	61.284.400	Selesai
5	PUSDATIN	Setelah Tahun 1983	Pemusnahan	2.300.478.978	25 Agustus 2017	S.762/M-DPDTT/SJ/08/2017	1.419.505.270	Selesai
	PUSDATIN	Setelah Tahun 1989	Pemusnahan	2.020.270.000				Dalam Proses
6	BLM Banjarmasin	Setelah Tahun 2003	Pemusnahan	366.873.601	21 April 2017	S.274/M-DPDTT/SJ/04/2017	291.505.701	Selesai
7	BLM Makassar	Setelah Tahun 1982	Pemusnahan	1.683.516.090	10 Mei 2017	S.309/M-DPDTT/SJ/05/2017	537.030.609	Selesai
8	Sekretariat Balilatfo	Setelah Tahun 1998	Pemusnahan	2.224.962.900	30 Januari 2017	S.062/M-DPDTT/SJ/01/2017	1.611.024.100	Selesai
9	Sekretariat Balilatfo	Setelah Tahun 2003	Lelang	365.534.000				- Dalam Proses
10	BPPTP Bengkulu	Setelah Tahun 1979	Pemusnahan	191.605.934				Dalam Proses
	BPPTP Bengkulu	Setelah Tahun 1979	Lelang	195.009.332				Dalam Proses
11	BLM Pekanbaru	Setelah Tahun 2002	Pemusnahan	268.115.000	10 Mei 2017	S.309/M-DPDTT/SJ/05/2017	34.776.000	Selesai
Total				12.848.817.545			4.435.495.387	

Terdapat 7 Satker yang telah dilakukan penghapusan berupa pemusnahan sebanyak 3 satker dengan Surat Nomor:

- S.964/M-DPDTT/SJ/09/2017 oleh Balai Latihan Masyarakat Denpasar S.062/M-DPDTT/SJ/04/2017 oleh Sekretariat Balilatfo
- S.1170/M-DPDTT/SJ/11/2017 oleh Balai Besar latihan Masyarakat Yogyakarta
- S.1315/M-DPDTT/SJ/11/2017 oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta
- S.760/M-DPDTT/SJ/08/2017 oleh Puslitbang
- S.762/M-DPDTT/SJ/08/2017 oleh Pusdatin
- S.274/M-DPDTT/SJ/04/2017 oleh Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin
- S.309/M-DPDTT/SJ/05/2017 oleh Balai Latihan Masyarakat Makassar

- S.062/M-DPDTT/SJ/01/2017 oleh Sekretariat Balilatfo
 - S/309/M-DPDTT/SJ/05/2017 oleh Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru
- d. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN, telah dilakukan revaluasi atas tanah, gedung & Bangunan serta jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan pada balai-balai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi.
- Rincian Balai yang telah melakukan revaluasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Penilaian Kembali adalah sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Wajar (Inventarisasi dan Penilaian)	Koreksi Inventarisasi dan Penilaian	Keterangan
1	BP2TP Bengkulu					
	- Tanah	20.485.542.000	20.485.542.000	172.830.565.000	152.345.023.000	
	- Gedung dan Bangunan	2.295.418.650	684.369.896	6.685.603.000	6.001.233.104	
2	BBPLM Jakarta					
	- Gedung dan Bangunan	26.790.452.472	22.270.885.440	12.687.088.000	(9.583.797.440)	
	BBLM Yogyakarta					
3	- Tanah	19.980.319.000	19.980.319.000	67.449.446.000	47.469.127.000	
	- Gedung dan Bangunan	15.114.158.103	11.427.661.248	14.859.834.000	3.549.795.722	Terdapat barang tidak ditemukan berupa - Pagar Lainnya - Pagar Semi Permanen - Pagar Permanen
	- Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	183.417.500	139.662.660	113.387.000	(16.190.660)	Terdapat barang tidak ditemukan berupa - Saluran Drainage
4	BLM Makasar					
	- Tanah	6.475.192.270	6.475.192.270	62.956.953.000	56.481.760.730	
	- Gedung dan Bangunan	7.484.205.000	6.263.859.459	12.548.409.000	7.407.931.981	Terdapat Barang Berlebih berupa - Gedung Pos Jaga Permanen - Bangunan Fasilitas Umum Lainnya - Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Terdapat barang tidak ditemukan berupa - Pagar Permanen - Pagar Permanen - Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Bangunan Terbuka Lainnya - Bangunan Gedung Kantor Permanen - Bangunan Gedung Kantor Permanen
5	BLM Denpasar					
	- Tanah	27.623.000.000	27.623.000.000	129.778.125.000	102.155.125.000	
6	- Gedung dan Bangunan	614.362.000	462.099.496	2.283.792.000	1.821.692.504	
	BLM Banjarmasin					
	- Tanah	1.268.929.868	1.268.929.868	41.464.500.000	40.195.570.132	
7	- Gedung dan Bangunan	6.715.897.261	5.391.328.197	9.858.677.000	4.526.141.347	Terdapat barang berlebih berupa - Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Terdapat barang tidak ditemukan berupa - Bangunan gedung tempat kerja lainnya - Bangunan klinik/ Puskesmas
	- Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	900.806.725	323.150.952	696.184.000	373.033.048	
	BLM Pekanbaru					
7	- Tanah	5.457.716.200	5.457.716.200	13.595.927.000	8.138.210.800	
	- Gedung dan Bangunan	12.280.676.632	11.549.895.980	10.733.294.000	(816.601.980)	
	JUMLAH					
	- Tanah	81.290.699.338	81.290.699.338	488.075.516.000	406.784.816.662	
	- Gedung dan Bangunan	44.504.717.646	35.779.214.276	69.656.697.000	12.906.395.238	
	- Jalan, Jembatan dan Bangunan Air	3.051.457.675	1.765.430.996	5.283.078.000	3.527.732.004	
	TOTAL	128.846.874.659	118.835.344.610	563.015.291.000	423.218.943.904	

NO	SATUAN KERJA	LAPORAN HASIL INVENTARISASI PENILAIAN KEMBALI	BERITA ACARA REKONSILIASI HASIL PENILAIAN KEMBALI
1	BP2TP Bengkulu	LHIP-071/WKN.05/KNL.01/2017 Tanggal 28 November 2017	BAR-074/WKN.05/KNL.01/2017 Tanggal 18 Desember 2017
2	BBPLM Jakarta	LHIP-0253/WKN.07/KNL.02/2017 Tanggal 22 Desember 2017	IP-0253/WKN.07/KNL.02/2017 Tanggal 28 Desember 2017
3	BBLM Yogyakarta	LHIP-297/WKN.09/KNL.06/2017 Tanggal 20 Desember 2017	BAR-IP-285/WKN.09/KNL.06/2017 Tanggal 22 Desember 2017
4	BLM Makasar	296/WKN.15/KNL.02/2017 Tanggal 7 Desember 2017	BAR-IP-282/WKN.15/KNL.02/2017 Tanggal 8 Februari 2018
5	BLM Banjarmasin	LHIP-113/WKN.12/03/2017 Tanggal 24 November 2017	BAR-113/WKN.12/KNL.03/REVAL/2017 Tanggal 24 November 2017
6	BLM Denpasar	LHIP-351/WKN.14/KPKNL.01/2017 Tanggal 27 Desember 2017	BAR-370/WKN.14/KNL.01/2017 Tanggal 7 Februari 2018
		LHIP-363/WKN.14/KPKNL.01/2017 Tanggal 27 Desember 2017	BAR-371/WKN.14/KNL.01/2017 Tanggal 7 Februari 2018

- e. Pada tahun 2018, satker pusat di lingkungan Balilatfo yang berada dalam satu gedung terdiri dari Sekretariat Balilatfo (350488), Pusdatin (350479), Puslitbang (350476) dan Puslatmas (350478) dimana awalnya masing-masing memiliki DIPA dimana selanjutnya akan dilikuidasi dan digabung menjadi satu DIPA yaitu Balilatfo dengan kode satker baru 350475. Hal ini sesuai dengan PMK No. 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.
- f. Berdasarkan Permendesa No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemendesa, PDT dan Trans Balilatfo mendapat tambahan 2 satker di tahun 2018 yaitu Balai Latihan Masyarakat Ambon (215155) dan Balai Latihan Masyarakat Jayapura (255164). Penambahan 2 satker di kawasan Indonesia Timur membantu tugas pelayanan pelatihan ke masyarakat di Kawasan Indonesia Timur yang semula hanya dikelola oleh Balai Latihan Masyarakat Desa, PDT dan Trans Makassar.
Balai Besar Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Trans Jakarta belum melakukan revaluasi tanah karena pihak KPKNL baru akan melakukan pengukuran revaluasi tanah Balai Besar Jakarta tahun 2018

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

PENGUNGKAPAN TERKAIT REVAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap sebagian objek raveluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp406.784.816.662,00
2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp479.893.882,00
3. Revaluasi atas Jalan dan Jembatan dilaksanakan pada semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp2.286.955.550,00
4. Revaluasi atas Irigasi dilaksanakan pada semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp6.133.213.288,00

Terkait Jurnal Koreksi Revaluasi Aset Tetap Tahun 2017, sebagai berikut :

Lampiran II
 Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 Nomor : S- 3507/PB.6/2018
 Tanggal : 17 April 2018

BA : 067 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

NO	AKUN	URAIAN NAMA AKUN	D	K
1	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan	407.909.535	
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		407.909.535
2	591312	Beban Penyusutan Irigasi	76.050.125	
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		76.050.125
3	133111	Gedung dan Bangunan	2.394.141.000	
	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		2.394.141.000
4	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan	189.943.110	
	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		189.943.110
5	391114	Revaluasi Aset Tetap	13.221.683.390	
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan		13.221.683.390
6	391114	Revaluasi Aset Tetap	2.286.955.550	
	134111	Jalan dan Jembatan		2.286.955.550
7	391114	Revaluasi Aset Tetap	479.893.882	
	133111	Gedung dan Bangunan		479.893.882
8	391114	Revaluasi Aset Tetap	795.477.309	
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		795.477.309
9	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.213.300.813	
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan		1.213.300.813
10	134112	Irigasi	6.133.213.288	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		6.133.213.288
11	391114	Revaluasi Aset Tetap	406.784.816.662	
	131111	Tanah		406.784.816.662
12	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan	739.098.239	
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan		739.098.239
KONTROL			434.722.482.903	434.722.482.903

Hasil revaluasi akan disajikan pada Laporan Keuangan setelah seluruh objek revaluasi di seluruh K/L Pemerintah Pusat selesai dinilai kembali.

Inspektorat Jenderal

1. Terdapat Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Revisi ke-1 pada tanggal 28 Februari 2017 yaitu terdapat penambahan akun pada belanja gaji (51) yang tidak merubah nominal pagu secara global.
 - b. Revisi ke-2 pada tanggal 5 April 2017 yaitu adanya pergeseran pagu belanja barang menjadi belanja modal sebesar Rp225.370.000,00.
2. Progres penetapan status penggunaan BMN per 31 Desember 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp7.386.642.005,00
 - 1) Nilai perolehan BMN (Aktiva Tetap) Inspektorat Jenderal sampai dengan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.386.642.005,00, meliputi :
 - a. Peralatan & Mesin (Intra) Rp 7.386.642.005,00
 - b. Peralatan & Mesin (Ekstra) Rp 2.000.000,00
 - c. Aktiva Tetap Lainnya Rp 49.875.000,00

Jumlah **Rp7.438.517.005,00**
 - 2) Terhadap Penetapan Status Penggunaan BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp 7.438.517.005,00 tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. untuk BMN Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara sejumlah 934 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp3.591.024.200,00 dan dengan kondisi 931 unit baik dan 3 unit rusak ringan;
 - b. untuk BMN Kendaraan Bermotor, berupa 14 unit Kendaraan Bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp3.475.311.005,00 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: KEP-144/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetaan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- c. untuk BMN Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) yaitu 1 (satu) unit *Conference System (Sound System)* senilai Rp148.250.000,00 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-146/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Penetaan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- d. untuk BMN Peralatan dan Mesin (termasuk kendaraan bermotor roda 2) dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun Anggaran 2017 senilai Rp223.931.800,00 akan diusulkan penetapan status penggunannya pada tahun 2018.

Direktorat Jenderal PPMD

Hutang Pihak Ke Tiga

Terdapat Tunggakan atas belanja modal laptop di Kantor Pusat sebesar Rp. 372.000.000,- yang tidak dicatat di Neraca

Direktorat Jenderal PDT

1. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya dapat dijelaskan bahwa mapping otomatis akun penyesuaian Nilai Persediaan MAP 39117 menjadi Pendapatan Penyesuaian Nilai MAP 491511 atau Beban Penyesuaian Nilai Persediaan MAP 593311 selama ini, akun Penyesuaian Nilai Persediaan yang dihasilkan dari koreksi

otomatis persediaan, koreksi masuk/ keluar persediaan diperlakukan sebagai penyesuaian Nilai Aset tahun berjalan dan disajikan dalam LPE. Pada aplikasi SAIBA ver 4.4 dilakukan perubahan dimana akun penyesuaian Nilai Persediaan yang berada diposisi kredit akan dimapping menjadi akun Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, sedangkan akun Penyesuaian Nilai Persediaan yang berada disisi Debet akan dimapping menjadi akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan. Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan disajikan dalam Laporan Operasional (LO), sebagai bagian dari Pendapatan dan Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya. Mapping otomatis tersebut terjadi pada saat dilakukan posting aplikasi SAIBA versi 4.4

2. Aset Tetap

Pertanggal 31 Desember 2017 terdapat Aset Lain-lain sebesar Rp2.043.895.750,- kondisi barang tersebut sudah Rusak Berat dan telah dihentikan penggunaannya dari kegiatan operasional. Saat ini kami sedang melakukan proses penghapusan atas Aset rusak berat tersebut.

3. Aset Lain-lain

- Dalam Aset Lain-lain terdapat Bantuan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah belum dapat kami lakukan penghapusan hal ini dikarenakan masih adanya kendala dalam proses penghapusan dimana Bantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah tercatat berupa 1 Paket yang terdiri dari beberapa Kabupaten sedangkan usulan yang telah disetujui untuk dihibahkan baru beberapa Kabupaten.
- Adanya asset Satker Tugas Pembantu yang tidak aktif dan telah disetujui untuk dihibahkan sebanyak 2 Kabupaten, namun belum dibuatkan SK penghapusannya sehingga masih tercatat pada SIMAK BMN Ditjen PDT yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Pinrang, dan akan ditindaklanjuti pada

semester II TA 2017.

4. Proses Rekonsiliasi E-Rekon

Dalam proses rekonsiliasi E-Rekon terdapat Satker Papua yang terdapat selisih Kas dibendahara Pengeluaran sebesar Rp20.000.000,- hal ini dikarenakan kas dibendahara pengeluaran yang belum diinput di SAIBA sehingga pada saat upload e-rekon terdapat selisih.

Direktorat Jenderal PKP

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK -RI Tahun Anggaran 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp284.518.542,28, sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp105.223.477,00 dan sisanya sebesar Rp179.295.065,28 masih dalam proses.

Kejadian Setelah neraca sebagai berikut:

- a. Sudah disetor di Bulan Januari 2018 sebesar Rp185.000.000,00 untuk kekurangan volume atas pekerjaan TA.2015
- b. Progress hibah akun 526 (Persediaan) yang diserahkan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sudah dilakukan (*terlampir di rincian progress hibah barang*)

TA 2015	NILAI BANTUAN	PERIODE PER 09 FEBRUARI 2018			BELUM DIUSULKAN
		USULAN KE SEKJEN	DISETUJUI SEKJEN	SK PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6
Ekonomi	51.458.939.340	7.540.114.700	17.604.852.240	-	26.313.972.400

Sarpras	333.775.469.889	196.073.298.980	14.954.936.700	5.664.948.300	117.082.285.909
SDA	141.760.055.240	17.453.517.839	38.885.416.214	4.029.951.460	81.391.169.727
Kerjasama	11.960.474.426	3.825.454.114	1.024.501.984	6.036.489.210	1.074.029.117
Total	538.954.938.894	224.892.385.633	72.469.707.138	15.731.388.970	225.861.457.153
Prosentase		41,73%	13,45%	2,92%	41,91%

TA 2016	NILAI BANTUAN	PERIODE PER 09 FEBRUARI 2018			BELUM DIUSULKAN
		USULAN KE SEKJEN	DISETUJUI SEKJEN	SK PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6
Ekonomi	45.912.926.279	45.442.561.686	-	470.364.593	
Sarpras	296.285.854.191	247.638.842.444	25.441.571.523	23.205.440.224	
SDA	157.260.267.673	31.011.911.998	103.863.002.949	22.385.352.726	
Total	499.459.048.143	324.093.316.128	129.304.574.472	46.061.157.543	
Prosentase		64,88%	25,89%	9,22%	

TA 2017	NILAI BANTUAN	PERIODE PER 09 FEBRUARI 2018			BELUM DIUSULKAN
		USULAN KE SEKJEN	DISETUJUI SEKJEN	SK PENGHAPUSAN	
1	2	3	4	5	6
Ekonomi	20.673.287.000	-	-	-	20.673.287.000
Sarpras	64.055.705.240	-	-	-	64.055.705.240
SDA	60.886.868.289	-	-	-	60.886.868.289
Total	145.615.860.529	-	-	-	145.615.860.529
Prosentase		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Gedung dan Bangunan yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu Gedung B lantai 3 dan lantai 4 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih dalam proses pemindahtanganan dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktorat Jenderal PDTu

1. Pada akun persediaan terdapat pembayaran uang muka (UM) pekerjaan PLTS Kabupaten Sanggau atas nama PT. Multi Servindo Prima dengan nilai terbayar Rp1.042.673.600 (SP2D nomor 151751302019408) dan Kepulauan Aru atas nama PT. Multi Servindo Prima dengan nilai terbayar Rp667.877.400 (SP2D nomor 151751301041391). Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan audit ulang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan LHA No.RHS.16/IJ/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 untuk dilakukan penagihan kepada penyedia dengan ditambahkan nilai denda keterlambatan pekerjaan maksimal 5% dari nilai kontrak sehingga total yang ditagihkan kepada PT. Multi Servindo Prima sebesar Rp1.880.376.273,-. telah dilakukan Penyampaian Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi kepada Direktur PT. Multi Servindo Prima Nomor: 036.7/DPDTT/DPDTU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017.
2. Terdapat pekerjaan yang belum terbayar di tahun 2017 yang dilanjutkan pengerajan nya di tahun 2018 sebesar Rp15.109.836.430,00. Terdiri dari kegiatan Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sebesar Rp14.770.504.200,00, Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan sebesar Rp145.002.230,00, dan Direktorat

Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar sebesar Rp194.330.000,00.

Direktorat Jenderal PKTrans

• Hibah

Hibah sesuai PMK 111/PMK.06/2016 dari Ditjen PKTrans yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

- Usulan Hibah sebanyak 343 usulan senilai Rp1.639.089.346.340,00
- Persetujuan Hibah yang sudah disetujui sebanyak 188 Usulan senilai Rp746.167.441.544,00
- Risalah Hibah sebanyak 137 Usulan senilai Rp490.135.160.366,00

• Penjelasan Yang Berkaitan Dengan E Rekon

- ✓ Penjelasan tentang Jurnal Tidak Lazim pada E Rekon dapat dijelaskan sebagai berikut :

SATKER	TGL DOC.	NO. DOC.	AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
Kab. Kota Subulussalam	18/12/2017	201712350141003	117911	-	500.000	Jurnal koreksi akun dari 117911 Persediaan Blm Diregister ke 521211 Beban Bahan karena biaya photocopy tidak termasuk dalam persediaan
Kab. Kota Subulussalam	30/09/2017	201709350141001	117911	-	500.000	
Kab. Kota Subulussalam	04/12/2017	201712350141002	117911	-	500.000	
Kab. Banyuasin	31/10/2017	201710350173002	134211	374.450.670	-	
Kab. Banyuasin	30/11/2017	201711350173003	134211	991.526.260	-	Jurnal Koreksi atas akun 134213 Jaringan Blm Diregister ke akun 134211 Jalan dan Jembatan Blm Register karena memunculkan Saldo Tidak Normal
Kab. Banyuasin	31/10/2017	201710350173002	134213	-	374.450.670	
Kab. Banyuasin	30/09/2017	201709350173001	134211	405.157.170	-	
Kab. Banyuasin	30/11/2017	201711350173003	134213	-	991.526.260	
Kab. Banyuasin	30/09/2017	201709350173001	134213	-	405.157.170	
Kab. Lahat	29/12/2017	201712350176000	117911	-	300.000	Jurnal koreksi akun dari 117911 Persediaan Blm Diregister ke 521211 Beban Bahan karena biaya photocopy tidak termasuk dalam persediaan
Kab. Lahat	31/08/2017	201708350176000	117911	-	250.000	
Kab. Lahat	31/05/2017	201705350176005	117911	-	970.000	
Kab. Lahat	30/07/2017	201707350176000	117911	-	550.000	
Kab. Tulang Baw ang	02/01/2017	201701350184001	133111	9.000	-	Koreksi kelebihan Catat atas aset di satker konsolidasi 2016, dilakukan jurnal balik di Tahun 2017
Kab. Tulang Baw ang	02/01/2017	201701350184002	134111	-	400	
Prov. Sulawesi Tengah	30/06/2017	2017063502641	117911	-	1.047	Jurnal untuk koreksi pencatatan pengadaan beras di Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi Persediaan karena pembulatan (pencatatan di Aplikasi Persediaan tidak bisa mengakomodir nilai pecahan)
Prov. Sulawesi Tengah	30/08/2017	201708350264051	117911	-	1.000.000	Jurnal reklasifikasi akun dari 117911 Persediaan Blm Diregister ke 521211 Beban Bahan karena biaya photocopy tidak termasuk dalam persediaan
Prov. Sulawesi Tengah	31/12/2017	2017123502643	117911	1.799.000	-	Jurnal koreksi atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan sprotan intensifikasi lahan pekarangan oleh CV. Sumber Jaya (Hasil Temuan Audit Ijen)
Kab. Bima	30/06/2017	201706350329001	134111	419.699.000	-	Jurnal koreksi atas akun 134113 Jaringan ke akun 134111 Jalan dan Jembatan setelah melakukan rekon internal Neraca Simak BMN dan Saliba
Kab. Bima	30/06/2017	201706350329001	134113	-	419.699.000	
Prov. Gorontalo	25/06/2017	201706350412001	117911	2.000	-	Jurnal untuk koreksi pencatatan di Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi Persediaan karena pembulatan nilai (pencatatan di Aplikasi Persediaan tidak bisa mengakomodir nilai pecahan)
Kab. Toli Toli	29/12/2017	201712350487002	134212	-	1.717.646.600	Jurnal Koreksi atas akun 134212 Irigasi Blm Diregister ke akun 134211 Jalan dan Jembatan Blm Register karena memunculkan Saldo Tidak Normal
Kab. Toli Toli	30/09/2017	201709350487001	134212	-	717.591.400	
Kab. Toli Toli	30/09/2017	201709350487001	134211	717.591.400	-	
Kab. Toli Toli	29/12/2017	201712350487002	134211	1.717.646.600	-	

Sekretariat Jenderal

- a. Bendahara Pengeluaran satker Sekretariat Jenderal Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi memiliki rekening sebanyak 2 rekening yang terdiri dari:
1. Rekening BNI dengan nomor rekening (0387475633) yang dipergunakan untuk transaksi LS bendahara, UP dan TUP;
 2. Rekening BTN dengan nomor rekening (101300008766) yang dipergunakan khusus untuk menampung penerimaan Tunjangan Kinerja, pada tahun 2017 rekening tersebut telah ditutup
- b. Pada akhir tahun anggaran 2016 masih terdapat sisa saldo karena ada bunga jasa bank yang baru masuk tanggal 31 Desember 2016 pada rekening BTN sebesar

Rp2.985.592,-. dan telah disetorkan oleh pihak BTN pada tanggal 25 Januari 2017 dengan nomor NTPN 1FE301C3NJ3HR74O.

- c. Tanggal 2 Juni 2017 Revisi 2 Pagu Sekretariat Jenderal Kemeneterian Desa, PDT dan Transmigrasi bertambah sebesar Rp 65.000.000.000,- yang bersumber dari pelimpahan sebagian dana Pinjaman Luar Negeri (LOAN)

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Direktorat Jenderal PKP

Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK – RI Tahun Anggaran 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- Terkait atas kekurangan volime dan denda keterlambatan sebesar Rp292.881.649,00 dan sudah disetor ke Kas Negara.

Direktorat Jenderal PDTu

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Nomor 58C/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 pada Ditjen PDTU terdapat :

- a) Pertanggungjawaban Belanja yang menggunakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada bulan Desember 2015 belum dilengkapi bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp6.285.746.956,00. Menindaklanjuti temuan tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi masih melakukan verifikasi dokumen dan meneliti kebenaran pembayaran tersebut, dan hasilnya akan dikomunikasikan dengan Tim BPK.

b) Terdapat temuan BPK di tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar Rp3.435.568.529,05, yang harus di setorkan ke kas negara. Yang sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp1.980.798.307,28. Sisa sebesar Rp1.454.770.221,77 belum disetorkan ke kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan fisik, dan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan kegiatan rapat dalam kantor.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas sistem pengendalian intern Nomor:58B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 Sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu telah ditindaklanjuti dengan melakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN terdiri dari:

- a) Pencatatan aset lain-lain yaitu aset lain-lain yang berasal dari mutasi reklasifikasi dari Persediaan untuk diserahkan kepada PEMDA senilai Rp876.116.310.077,00 yang merupakan muatasi dari Persediaan berupa Bantuan Pemerintah pengadaan Tahun Anggaran 2014 dan 2015, pengadaan T.A 2014 senilai Rp298.349.327.810,00 dan pengadaan T.A 2015 senilai Rp577.766.982.267,00, sudah diusulkan Hibah Ke Sekjen dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan Tahun Anggaran 2014 sudah diusulkan hibah ke Sekjen Kemendesa PDTT di Tahun Anggaran 2017 senilai Rp298.349.327.810,00.
 - Pengadaan Tahun Anggaran 2015 sudah

diusulkan hibah ke Sekjen Kemendesa PDTT di Tahun Anggaran 2017 senilai Rp261.883.453.838,00 sudah keluar persetujuan hibah oleh Sekjen Kemendesa PDTT Rp176.968.623.558,00 dan proses persetujuan hibah oleh Sekjen Kemendesa PDTT senilai Rp71.651.850.797,00.

- b) Pencatatan Reklasifikasi Aset Tetap hasil inventarisasi berupa BMN Rusak Berat menjadi Aset lain-lain dalam kondisi rusak berat senilai Rp406.125.194.619,00 yang terdiri dari:
- BMN dimaksud adalah merupakan Bantuan Pemerintah yang peruntukannya sejak awal akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah senilai Rp402.962.266.366,00 merupakan perolehan dari Tahun Anggaran 2012-2014, sudah diusulkan hibah ke Sekjen senilai Rp402.962.266.366,00 ditahun 2017 sampai dengan saat ini masih dalam Proses Penelitian dan Laporan APIP senilai Rp99.533.746.514,00 sudah ada Laporan Penilitian APIP;
 - Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dengan Kondisi Rusak Berat (RB) senilai Rp3.438.322.565,00 dikurangi transaksi normalisasi Aset Tetap proses aplikasi SIMAK BMN berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp275.394.312,00 menjadi Rp3.162.928.253,00; Aset Tetap tersebut Berupa Peralatan dan Mesin Eks Kegiatan P2DTK tidak lagi dikuasai dan dipergunakan untuk operasional Ditjen PDTu, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan Inventarisasi Aset di T.A 2016

dengan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara

Nomor:333/DPDTT/DPDTU.1/09/2016

Tanggal 5 September 2016. Berdasarkan Hasil Inventarisasi aset dalam Kondisi Rusak Berat (RB) Eks Kegiatan P2DTK senilai Rp2.810.260.199,00 sudah dilakukan Penelitian aset yang dilakukan Tim Internal Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Nomor:20.1/DPDTT/DPDTU/SK/07/2016

Tanggal 22 Juli 2016 tentang Pembentukan Tim Internal Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Ditjen PDTu dan sudah dilakukan Usulan Pemusnahan Ke Sekjen Kemendesa PDTT dengan Surat Usulan Pemusnahan Nomor:390/DPDTT/DPDTU.1/11/2016

berdasarkan Surat Pernyataan Pemusnahan Barang Milik Negara

Nomor:402/DPDTT/DPDTU.1/11/2016. Sisa senilai Rp352.668.363,00 diusulkan penghapusan BMN di T.A 2017 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan surat usulan Nomor: 721/DPDTT/DPDTU.1/08/2017 tentang permohonan usulan pemusnahan BMN di Lingkungan Ditjen PDTu.

- c) Terdapat Persediaan Berupa Bantuan Pemerintah Senilai Rp361.181.928.715,00; terdapat dokumen BAST senilai Rp13.871.075.718,00; terdapat dokumen pendukung lainnya senilai Rp347.310.852.997,00. Sudah ditindaklajuti Proses Hibah BMN Berupa Bantuan

Pemerintah.

d) Progres Hibah BMN berupa Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pengadaan Tahun Anggaran 2012-2017, total BMN berupa Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu sebesar Rp1.883.884.713.646,00. Usulan Hibah BMN yang telah diajukan kepada Sekjen dan telah dikeluarkan dari pencatatan laporan keuangan sebesar Rp1.359.229.635.967,00 yang telah ada Persetujuan Hibah BMN sebesar Rp287.288.249.366,00 dan sudah diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebesar Rp107.114.645.088,00. Jumlah bantuan pemerintah yang sedang dalam proses pengajuan usulan hibah per 31 Desember 2017 sebesar Rp524.655.077.679,00.

BPK merekomendasikan KPB memberikan sanksi kepada pengelola barang dan petugas BMN pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Sudah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Tertulis.

Direktorat Jenderal PDT

A. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengadaan Kapal (Deputi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha - Kementerian PDT nilai temuan sebesar Rp1.776.199.000,- sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp26.199.000,- sehingga sisa nilai temuan sebesar Rp1.750.000.000,-

2. Bantuan Stimulan Pengembangan Infrastruktur Energi Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS 80WP di Kab. Paniai – Deputi Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT nilai temuan sebesar Rp675.350.000,- sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp10.000.000,- sehingga sisa nilai temuan sebesar Rp665.350.000,-
3. Pekerjaan Konstruksi Elektrifikasi di 18 Kabupaten (6 Paket) Deputi Peningkatan Infrastruktur Kementerian PDT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT. Ghanda Victory Bersinar dengan nilai temuan Rp250.347.510,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp166.338.000,- sehingga sisa nilai temuan sebesar Rp84.009.510,-;
 - b. PT. Leondra Mitra Sejati dengan nilai temuan Rp167.451.592,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp167.451.592,- dan sudah lunas;
 - c. PT. Krismabe Karya dengan nilai temuan sebesar Rp266.778.506,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp360.379.000,- sehingga ada kelebihan dalam penyetoran sebesar Rp93.600.494,-
 - d. PT. Banten Mula Mandiri dengan nilai temuan sebesar Rp268.491.780,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp268.491.780,- dan sudah lunas;
 - e. PT. Mahardika Karya Nugraha dengan nilai temuan Rp37.551.322,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp37.551.322,- dan sudah lunas;
 - f. PT. Berdikari Utama Jaya dengan nilai temuan Rp68.187.600,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp68.187.600,- dan sudah lunas.
4. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Kab. Nabire, Biak Numfor dan Kab. Halmahera Selatan dengan temuan sebagai berikut:
 - a. PT. Tegar Kawini Mandiri dengan nilai temuan sebesar Rp371.679.000,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp371.679.000,- dan sudah lunas;
 - b. PT. Indra Acis dengan nilai temuan sebesar

Rp626.306.000,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp626.306.000,- dan sudah lunas.

5. Peningkatan Infrastruktur Infotel Warung Informasi Masyarakat (Infotel II-6) di Kab. Seruyan-Eks Deputi II dengan nilai temuan Rp53.455.000,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp53.455.000,- dan sudah lunas

Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI TA 2014 dengan nilai temuan Rp4.561.797.310,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.156.038.294,- sehingga sisa nilai temuan Rp2.499.359.510,-

B. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Direktorat Sarana dan Prasarana ada temuan sebesar Rp441.561.000,- pada kegiatan Pembangunan PLTS Oleh PT. Multi Servindo dengan No. Kontrak 25/SPK/Sarpras-PDT/X/2015 sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp441.561.000,- sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;
2. Pada Pembangunan Jalan Baru Ruas Atiahu-Balakeu Oleh PT. Rio Buana dengan No. Kontrak 18/SPK/Sarpras-PDT/X/2015 sebesar Rp171.260.379,16 sudah dilakukan penyetoran Rp171.260.379,16 sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;
3. Pada kegiatan Pembangunan PLTA Oleh PT. Total Daya dengan No. Kontrak 30/SPK/Sarpras-PDT/XI/2015 sebesar Rp119.225.000,- sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp119.225.000,- sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;
4. Pada kegiatan Pengadaan KJA Oleh PT. Panorama Cakra Buana dengan No. Kontrak 1/SPK-BRG/Sarpras-PDT/IX/2015 sebesar Rp154.151.250,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp30.00.000,- sehingga sisa nilai temuan Rp124.151.250,-;
5. Pada kegiatan Pembangunan Irigasi Moswaren Oleh PT. Nikita Raya dengan No. Kontrak 31/SPK /Sarpras-PDT/XI/2015 Rp46.588.837,26 sudah

- disetor Rp46.588.837,26 sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;
6. Pada kegiatan Pembangunan Jalan Kampung Ani-Keyen oleh PT. Maesa Jaya dengan No. Kontrak 10/SPK/Sarpras-PDT/IX/2015 sebesar Rp182.296.238,- dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp50.000.000,- sehingga sisa nilai tagihan sebesar Rp132.296.238,-;
 7. Pada kegiatan Pembangunan Jalan Desa oleh PT. Baya Raya Perkasa dengan No. Kontrak 07/SPK/Sarpras-PDT/IX/2015 sebesar Rp116.591.880,-sudah disetorkan sebesar Rp116.591.880,- sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;
 8. Pada kegiatan Pembangunan Jalan Kampung Keyen-Wersar oleh PT. Mekar Papua Nusantara dengan No. Kontrak 11/SPK/Sarpras-PDT/IX/2015 sebesar Rp208.872.485,20 sudah disetor Rp208.872.485,20 sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;
 9. Pada kegiatan Pembangunan Jalan Penghubung Kawar-Mega oleh PT. Putra Papua Barat dengan No. Kontrak 12/SPK/Sarpras-PDT/IX/2015 sebesar Rp153.669.709,10 sudah disetor sebesar Rp153.669.709,- sehingga sisa tagihan Rp0,10;
 10. Pada kegiatan Pembangunan Jalan Sailala-Maudus oleh PT. Papua Indo Mustika dengan No. Kontrak 13/SPK/Sarpras-PDT/IX/2015 sebesar Rp126.798.449,36 sudah disetor Rp126.798.449,- sehingga sisa tagihan Rp0,36;
 11. Pada kegiatan Pembangunan Jalan Kampung Kalibumi – Kampung Kali Jernih oleh PT. Apro Megatama dengan No. Kontrak 06/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2015 sebesar Rp463.884.815,61 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp463.884.815,- sehingga masih ada sisa tagihan sebesar Rp0,61;
 12. Pada Kegiatan Pembayaran Uang Saku Rapat sebesar Rp39.000.000,- dan belum dilakukan

penyetoran sehingga masih ada sisa tagihan sebesar Rp 39.000.000,-;

13. Pada kegiatan Bantuan Alat Mesin Pengembangan Inovasi di DT oleh PT. Prama Bhima dengan nilai temuan Rp459.143.825,- dan sudah disetorkan sebesar Rp459.143.825,- sehingga tidak ada lagi sisa tagihan;

Total temuan di Direktorat Sarana Prasarana sebesar Rp2.683.043.868,69 yang telah disetor sebesar Rp2.447.596.379,62,- sisa tagihan sebesar Rp235.447.489,07,-.

C. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
 1. Terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern Kabupaten Bangkalan sebesar Rp2.619.899.800,- sudah disetor sebesar Rp100.000.000,- sehingga sisa temuan Rp2.519.899.800,-;
 2. Terdapat temuan kemahalan dalam pekerjaan Pengadaan 5 Paket Peternakan Modern Kabupaten Bangkalan Rp526.080.000,- dan belum dilakukan penyetoran sehingga sisa tagihan Rp526.080.000,-;
- Direktorat Sarana dan Prasarana
 1. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Pembangunan Warung Internet di Kabupaten Bangkalan sebesar Rp40.425.784,- sudah disetor Rp40.425.784,- sehingga tidak ada sisa tagihan.
- Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal
 1. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Pengadaan Bantuan Stimulan Saran Pengembangan Komoditas Rp792.165.000,- dan sudah disetor Rp500.000.000,- sehingga sisa tagihan Rp292.165.000,-.

D. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
 1. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Pusat Belajar Masyarakat (PBM) di 5 kabupaten Daerah Tertinggal sebesar Rp127.501.151,40 dan sudah disetor Rp50.000.000,- sehingga sisa tagihan sebesar Rp77.501.151,40;
 2. Kekurangan Volume pekerjaan Pembangunan Pusat Belajar Masyarakat (PBM) di Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp3.644.094,33 dan sudah disetor Rp3.644.094,33 sehingga tidak ada sisa tagihan;
 3. Adanya keterlambatan dalam Belanja Barang Pembangunan Saung Terampil diKabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima sehingga dikenakan denda sebesar Rp18.945.794,94 dan sudah disetor Rp18.945.794,94 sehingga tidak ada sisa tagihan.
- Direktorat Sarana dan Prasarana
 1. Adanya kekurangan volume atas pekerjaan Bantuan Peningkatan Jalan Desa Sausu – Manggalapi Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp211.454.353,14 dan belum dilakukan penyetoran sehingga sisa tagihan Rp211.454.353,14;
 2. Adanya Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Radio Komunitas Siaran Daerah sebesar Rp671.950.331,16 dan belum dilakukan penyetoran sehingga sisa tagihan Rp671.950.331,16;
 3. Adanya kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Kawasan Internet Masyarakat sebesar Rp13.341.290,- dan adanya pemborosan Rp366.000.000,- sehingga total tagihan Rp379.341.290 dan belum adanya penyetoran sehingga sisa

tagihan Rp379.341.290,-;

- Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal
 1. Adanya Kekurangan Volume Pekerjaan Bantuan Alat Pasca Panen (Paket II) pada biaya bongkar muat barang sebesar Rp58.170.000,- dan sudah disetor Rp58.170.000,- sehingga tidak ada sisa tagihan;
 2. Kekurangan Volume Pekerjaan Bantuan Alat Pasca Panen (Paket I) pada biaya bongkar muat barang sebesar Rp49.500.000,- dan sudah disetor Rp49.500.000,- sehingga tidak ada sisa tagihan;
 3. Bantuan Pengembangan KAKAO Paket 1, 2 dan 3 Tahun Anggaran 2016 untuk pengiriman dan penanaman tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak oleh pihak penyedia sehingga mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp1.636.932.727,27 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp102.123.446,- sehingga sisa tagihan Rp1.534.809.281,27

BALILATFO

Terdapat permasalahan terkait Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI berupa:

- a) Berdasarkan hasil koreksi BPK pada Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta terdapat 1 unit kendaraan bermotor roda 2 yang hilang dan masih tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Kendaraan dengan merk Honda/GLP III Nomor Polisi B 5795 JQ sebesar Rp7.420.000 telah ditetapkan status TGR berupa pembebasan tuntutan ganti rugi. Sesuai catatan CaLK atas koreksi BPK pada Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta, kendaraan bermotor tersebut telah dilakukan

reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan.

- b) Pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat hasil koreksi BPK dimana diketahui terdapat kendaraan bermotor yang hilang dengan merk/type Honda/D1A02N18M1 A/T Nomor Polisi B 3403 SQC sebesar Rp14.929.500. Berita kehilangan motor tersebut telah dilaporkan ke pihak berwenang sesuai Laporan Polisi Nomor 1728/K/X/2016/Sek. Duren Sawit tanggal 12 Oktober 2016. Sesuai catatan CaLK Audited atas koreksi BPK pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara, kendaraan bermotor yang hilang tersebut telah direklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi.
- c) Berdasarkan hasil koreksi BPK pada satker Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta, diketahui terdapat bangunan rumah dinas dalam kondisi rusak berat yaitu Rumah Negara Gol II Tipe A Permanen sebanyak 7 (tujuh) unit senilai Rp147.488.000 dan gedung pos jaga senilai Rp2.096.000. Bangunan tersebut sudah dirobohkan oleh Pusdiklat ASN sebagai satker yang menempati tanah dan bangunan milik BBPLM dan BMN tersebut masih tercatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Sesuai catatan CaLK Audited atas Koreksi BPK pada Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta, bangunan dalam kondisi rusak berat tersebut telah direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan.
- d) Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) yang masih tercatat dalam SIMAK BMN pada Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta, sudah

ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. dengan mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi ke pada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I. melalui surat nomor : 686/SJ-KDPDTT/05/2017 tanggal 17 Mei 2017 dan masih dalam proses penyelesaian

- e) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta menempati Gedung dan Bangunan sendiri di Jl. Penganten Ali No. 71 A, Ciracas Jakarta Timur diatas tanah milik Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Sementara aset berupa Gedung dan Bangunan dan tanah yang berada di Jl. Empang Tiga No. 34 Jakarta Selatan punya Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta yang sekarang ditempati oleh Pusdiklat ASN Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I.

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 12:39 PM
 lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASSET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	18,938,471	222,396,599	(203,458,128)	(91.48)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,182,986	142,337	1,040,649	731.12
Piutang Bukan Pajak	964,895,514	21,395,514	943,500,000	4,409.80
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(4,824,477)	(106,978)	(4,717,499)	4,409.78
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	960,071,037	21,288,536	938,782,501	4,409.80
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	88,468,100	88,468,100	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(442,338)	(442,338)	0	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERPENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	88,025,762	88,025,762	0	0.00
Persediaan	399,770,817,759	1,369,671,545,946	(969,900,728,187)	(70.81)
JUMLAH ASSET LANCAR	400,839,036,015	1,370,003,399,180	(969,164,363,165)	(70.74)
ASET TETAP				
Tanah	120,992,735,697	136,523,334,174	(15,530,598,477)	(11.38)
Peralatan dan Mesin	331,245,725,328	313,652,551,221	17,593,174,107	5.61
Gedung dan Bangunan	330,387,908,090	576,038,877,297	(245,650,969,207)	(42.64)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	965,108,724,575	1,963,043,790,949	(997,935,066,374)	(50.84)
Aset Tetap Lainnya	212,537,171,053	311,138,739,396	(98,601,568,343)	(31.69)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24,495,714,219	35,864,803,190	(11,369,088,971)	(31.70)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(486,410,461,843)	(669,877,124,625)	183,466,662,782	(27.39)
JUMLAH ASET TETAP	1,498,357,517,119	2,666,384,971,602	(1,168,027,454,483)	(43.81)
ASSET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	7,775,495,654	6,860,302,507	915,193,147	13.34
Aset Lain-lain	2,501,523,762,400	4,304,338,746,103	(1,802,814,983,703)	(41.88)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASSET LAINNYA	(967,209,424,954)	(1,107,752,966,203)	140,543,541,249	(12.69)
JUMLAH ASSET LAINNYA	1,542,089,833,100	3,203,446,082,407	(1,661,356,249,307)	(51.86)
JUMLAH ASSET	3,441,286,386,234	7,239,834,453,189	(3,798,548,066,955)	(52.47)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,611,032,907	11,068,690,443	(4,457,657,536)	(40.27)
Uang Muka dari KPPN	18,938,471	222,396,599	(203,458,128)	(91.48)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,182,408	116,636	1,065,772	913.76
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6,631,153,786	11,291,203,678	(4,660,049,892)	(41.27)
JUMLAH KEWAJIBAN	6,631,153,786	11,291,203,678	(4,660,049,892)	(41.27)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,434,655,232,448	7,228,543,249,511	(3,793,888,017,063)	(52.48)
JUMLAH EKUITAS	3,434,655,232,448	7,228,543,249,511	(3,793,888,017,063)	(52.48)
JUMLAH EKUITAS	3,434,655,232,448	7,228,543,249,511	(3,793,888,017,063)	(52.48)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 12:39 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,441,286,386,234	7,239,834,453,189	(3,798,548,066,955)	(52.47)

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	9,096,501	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	9,841,970	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,182,986	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	14,895,514	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	950,000,000	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan	88,468,100	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	74,477
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	4,750,000
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	0	442,338
0.0	117111	Barang Konsumsi	137,655,905	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	11,669,600	0
0.0	117114	Suku Cadang	0	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	29,887,533,790	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	154,253,510,159	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	164,047,984,740	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	21,319,546,700	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	24,136,117,729	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,350,500	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	5,975,448,636	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	120,992,735,697	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	331,245,725,328	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	330,387,908,090	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	767,946,744,194	0
0.0	134112	Irigasi	128,518,870,630	0
0.0	134113	Jaringan	68,643,109,751	0
0.0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	0
0.0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	210,275,409,049	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,261,762,004	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam penggeraan	24,495,714,219	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	194,282,897,487
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	35,697,915,518
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	208,652,067,174
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	21,718,891,513

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,941,847,812
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	18,116,842,339
0.0	162151	Software	6,098,599,904	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,676,895,750	0
0.0	166111	Aset Lain-lain	91,204,173,544	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	2,410,061,830,006	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	257,758,850	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Dregister	0	0
0.0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	11,961,317,323
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	951,897,653,566
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,345,629,065
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	4,825,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	2,108,718,528
0.0	212116	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Yang Masih Harus	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,502,314,379
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	18,938,471
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	1,182,408
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,182,348,770,554
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,305,076,219	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,305,643,913	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,323,760,472
0.0	391111	Ekuitas	0	7,228,543,249,511
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	5,216,650,987
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	60,919,152,896
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	17,600,000	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1,577,514,590
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	12,057,824,743
3.0	423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan	0	560,284,715
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtempaan BMN Lainnya	0	462,370,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,301,089,443
3.0	423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	41,250,000
3.0	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	74,812,323
3.0	423319	Pendapatan Bunga Lainnya	0	9,938,147
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0	400,621,335
3.0	423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	0	5,605,955
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	91,524,162
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	11,646,835,891
3.0	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	2,235,961,741
3.0	423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang	0	24,087,176
3.0	423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	3,429,122,431

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	423971	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	10,915,800
3.0	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,393,678
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	44,686,157
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	74,793,110,732
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	82,668,910,773	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	53,107,500
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,086,409	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	7,186
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	5,594,371,214	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	7,702,740
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,334,714,807	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,934,660,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	19,500,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,688,985,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,405,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	566,257,340	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,770,817,950	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	10,581,546,400	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,120,603,410	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	522,704,572
3.0	511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	183,750,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembar	14,746,387,384	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembar	0	6,192,950
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	70,732,745,112	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	975,638,605
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	41,547,285,728	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	12,777,622
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	160,763,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	752,153,697	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	38,335,908,430	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	50,387,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13,265,909,150	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	124,814,312
3.0	521211	Beban Bahan	112,820,867,439	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	13,674,000
3.0	521212	Beban Barang Transito	4,000,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	41,997,843,500	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	55,579,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	153,213,670,406	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1,766,936,033
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	7,735,486,856	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	437,046,157	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	424,476,900	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,389,862,365	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	21,290,565	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	186,431,750,614	0
3.1	522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	0	27,819,000
3.0	522141	Beban Sewa	46,153,631,260	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	22,468,182
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	46,754,716,250	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	81,882,858
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,525,792,475,506	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	412,535,163
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,086,876,533	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	680,943,450	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,521,273,402	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	351,055,250	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	184,752,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1,156,204,374	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	351,921,525	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	260,230,544,098	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	4,617,615,299
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,705,971,010	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	900,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	205,566,790,154	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,498,730,398
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131,971,674,780	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	715,870,507
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	195,301,382	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	835,188,650	0
3.0	526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	160,330,069,937	0
3.0	526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	253,975,521,535	0
3.0	526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	370,466,764,644	0
3.0	526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada	38,374,231,484	0
3.0	526122	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	7,200,000,000	0
3.0	526123	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	185,500,000	0
3.0	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	742,465,682,093	0
3.0	526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	290,233,848,000	0
3.1	526312	Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang	0	4,732,700
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	73,627,081,479	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,986,059,252	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	94,416,078,071	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	11,147,243,534	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,259,866,585	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

Tgl. Cetak 21/04/2018 1:36 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl--rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	814,917,018	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	587,128,976	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	206,556,555,680	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	30,516,016,210	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	96,274,160	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	151,045,200	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	21,914,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	19,185,466,513	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	46,181,026	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	173,602,800	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	62,085,161,610	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	74,477	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	4,750,000	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	53,765,800	0
3.0	595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	60,000,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	2,696,809,329,672	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	362,500	0
JUMLAH			13,070,372,822,464	13,070,372,822,464

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN : 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 21/04/18 1:40 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 21/04/18 12:00

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0		0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0		0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0		0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0		0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0		0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0		0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0		0
Pendapatan Cukai	0	0		0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0		0
Pendapatan Bea Masuk	0	0		0
Pendapatan Bea Keluar	0	0		0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0		0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0		0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0		0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0		0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,396,995,596	5,087,576,605	(2,690,581,009)	(52.885)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,396,995,596	5,087,576,605	(2,690,581,009)	(52.885)
PENDAPATAN HIBAH	0	0		0
Pendapatan Hibah	0	0		0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0		0
Jumlah Pendapatan	2,396,995,596	5,087,576,605	(2,690,581,009)	(52.885)
BEBAN OPERASIONAL	0	0		0
Beban Pegawai	208,337,577,246	209,511,238,848	(1,173,661,602)	(0.56)
Beban Persediaan	30,757,714,036	68,562,192,376	(37,804,478,340)	(55.139)
Beban Barang dan Jasa	2,218,784,029,453	2,143,161,051,241	75,622,978,212	3.529
Beban Pemeliharaan	37,580,345,894	42,440,023,517	(4,859,677,623)	(11.451)
Beban Perjalanan Dinas	595,672,353,870	481,726,403,174	113,945,950,696	23.654
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,882,412,351,506	4,176,035,068,711	(2,293,622,717,205)	(54.923)
Beban Bunga	0	0		0
Beban Subsidi	0	0		0
Beban Hibah	0	0		0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN : 067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	Kode Lap : LO.KL Tanggal : 21/04/18 1:40 AM Halaman : 2 Prg ID : lap_lo_kl -- Tgl Data : 21/04/18 12:00
-------------------	---	---

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	3,837,000	(3,837,000)	(100)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	398,394,930,595	552,026,450,465	(153,631,519,870)	(27.83)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	4,824,477	46,163,025	(41,338,548)	(89.549)
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	5,371,944,127,077	7,673,512,428,357	(2,301,568,301,280)	(29.994)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,369,547,131,481)	(7,668,424,851,752)	2,298,877,720,271	(29.978)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,696,346,959,672)	(369,059,483,834)	(2,327,287,475,838)	630.6
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	462,370,000	188,700,000	273,670,000	145.029
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,696,809,329,672	369,248,183,834	2,327,561,145,838	630.351
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30,190,719,980	39,675,097,951	(9,484,377,971)	(23.905)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	92,276,244,090	296,957,530,311	(204,681,286,221)	(68.926)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	62,085,524,110	257,282,432,360	(195,196,908,250)	(75.869)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2,666,156,239,692)	(329,384,385,883)	(2,336,771,853,809)	709.436
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,035,703,371,173)	(7,997,809,237,635)	(37,894,133,538)	0.474
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,035,703,371,173)	(7,997,809,237,635)	(37,894,133,538)	0.474

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 21/04/18 1:39 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2017					2016				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0		0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	540,000,000	20,305,076,219	(19,765,076,219)	3760	377,100,000	44,997,050,753	(44,619,950,753)	11932		
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	540,000,000	20,305,076,219	(19,765,076,219)	3760	377,100,000	44,997,050,753	(44,619,950,753)	11932		
B	BELANJA				0				0		0
	BELANJA PEGAWAI	261,829,237,000	208,337,577,246	53,491,659,754	80	276,471,758,000	209,511,238,848	66,960,519,152	76		
	BELANJA BARANG	4,290,694,064,000	3,781,100,564,852	509,593,499,148	88	7,363,861,789,000	5,006,395,650,865	2,357,466,138,135	68		
	BELANJA MODAL	199,042,671,000	192,910,628,456	6,132,042,544	97	643,285,386,000	599,972,148,071	43,313,237,929	93		
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,751,565,972,000	4,182,348,770,554	569,217,201,446	88	8,283,618,933,000	5,815,879,037,784	2,467,739,895,216	70		
C	PEMBIAYAAN				0				0		0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI

Kode Lap : LPE.KL
Tanggal : 21/04/18 12:43
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,228,543,249,511	7,377,127,265,933	(148,584,016,422)	(2.014)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,035,703,371,173)	(7,997,809,237,635)	(37,894,133,538)	0.474
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	67,695,718,473	2,109,806,085,561	(2,042,110,367,088)	(96.791)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	(3,164,869,163)	3,164,869,163	(100)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5,216,650,987	120,498,771,191	(115,282,120,204)	(95.671)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	60,901,552,896	1,790,921,469,119	(1,730,019,916,223)	(96.599)
LAIN-LAIN	1,577,514,590	201,550,714,414	(199,973,199,824)	(99.217)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,174,119,635,637	5,739,419,135,652	(1,565,299,500,015)	(27.273)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,793,888,017,063)	(148,584,016,422)	(3,645,304,000,641)	2,453.3 62
EKUITAS AKHIR	3,434,655,232,448	7,228,543,249,511	(3,793,888,017,063)	(52.485)

**NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI (BA 067) TAHUN 2017
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017 (AUDITED)**

Nomor : MINCF.067/03/R.../PB.6/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 April 2018, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BA 067) Tahun 2017, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, sebagai bentuk asersi final atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BA 067) Tahun 2017 dan untuk dikonsolidasikan dalam LKPP Tahun 2017 (Audited).

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKL/LK BA BUN (*Unaudited*) dilakukan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan, yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara). Hasil rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi audit Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi** menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam **Lampiran Nota Kesepakatan** ini kepada Ditjen Perbendaharaan (dhi. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan menyampaikan Laporan BMN kepada Ditjen Kekayaan Negara (dhi. Direktorat Barang Milik Negara) **paling lambat tanggal 23 April 2018**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
(BA 067)



Sriyono
NIP: 19651014 1987081 001

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



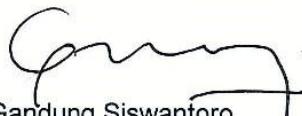
Satriotomo
NIP: 19720620 199603 1 001

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria
NIP 19650216 198603 1 001

MENGETAHUI
Tim Auditor BPK


 Gandung Siswantoro
 NIP 19780420 200604 1 003

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2017
PER 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : /PB.6/2018
Tanggal : April 2018

K/L : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
BA : 067

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	18.938.471	402.405.500	402.405.500	18.938.471
Kas di Bendahara Penerimaan	-			-
Kas Lainnya dan Setara kas	1.182.986	-		1.182.986
Kas pada BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek BLU	-			-
Investasi Jangka Pendek Lainnya	-			-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-			-
Uang Muka Belanja (prepayment)	-			-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-			-
Piutang Pajak	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak	-			-
Piutang Pajak (Netto)	-			-
Piutang Bukan Pajak	14.895.514			14.895.514
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(74.477)			(74.477)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	14.821.037	-	-	14.821.037
Bagian Lancar TPA	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA	-			-
Bagian Lancar TPA (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	88.468.100			88.468.100
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	(442.338)			(442.338)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	88.025.762	-	-	88.025.762
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-			-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	-	-	-	-
Piutang Lainnya	950.000.000			950.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya			4.750.000	(4.750.000)
Persediaan	399.770.817.759			399.770.817.759
Persediaan Belum Register	-			-
JUMLAH ASET LANCAR	399.893.786.015	1.352.405.500	407.155.500	400.839.036.015
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Dana Bergulir	-			-
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-			-
Investasi Non Permanen BLU	-			-
Investasi Non Permanen lainnya	-			-
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	-			-
Investasi Permanen BLU	-			-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-
ASET TETAP				
Tanah	531.441.558.882		410.448.823.185	120.992.735.697
Peralatan dan Mesin	331.310.055.328		64.330.000	331.245.725.328
Gedung dan Bangunan	331.354.102.972	2.394.141.000	3.360.335.882	330.387.908.090
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	975.815.705.337	6.133.213.288	16.840.194.050	965.108.724.575
Aset Tetap Lainnya	216.792.451.903		4.255.280.850	212.537.171.053

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2017
PER 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : /PB.6/2018

Tanggal : April 2018

K/L : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
BA : 067

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.353.002.219	12.142.712.000		24.495.714.219
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(194.310.553.916)	27.656.429		(194.282.897.487)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.538.429.697)	1.062.197.569	13.221.683.390	(35.697.915.518)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(237.118.114.685)	890.136.433	2.084.828.247	(238.312.806.499)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(18.116.842.339)			(18.116.842.339)
JUMLAH ASET TETAP	1.925.982.936.004	22.650.056.719	450.275.475.604	1.498.357.517.119
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Penjualan Angsuran	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-			-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi BLU	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR BLU	-			-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi BLU (Netto)	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-			-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-	-	-
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
Aset Tak Berwujud	7.775.495.654			7.775.495.654
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	-			-
Aset yg Dibatasi Penggunaannya	-			-
Dana Penjaminan	-			-
Dana Kelolaan BLU	-			-
Aset Lain-lain	2.547.272.675.100	13.847.036.523	59.595.949.223	2.501.523.762.400
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Phk Ke3	-			-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(980.427.027.533)	16.569.139.394	1.082.750	(963.858.970.889)
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain BLU	-			-
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.345.629.065)			(3.345.629.065)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(4.825.000)			(4.825.000)
JUMLAH ASET LAINNYA	1.571.270.689.156	30.416.175.917	59.597.031.973	1.542.089.833.100
JUMLAH ASET	3.897.147.411.175	54.418.638.136	510.279.663.077	3.441.286.386.234
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6.611.032.907	12.057.824.743	12.057.824.743	6.611.032.907
Utang Biaya Pinjaman	-			-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-			-
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.182.408			1.182.408
Hibah Yang Belum Disahkan	-			-
Uang Muka dari KPPN	18.938.471	402.405.500	402.405.500	18.938.471
Pendapatan Diterima Dimuka	-			-
JUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK	6.631.153.786	12.460.230.243	12.460.230.243	6.631.153.786
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-			-
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	-			-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-			-

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2017
PER 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
Nomor : /PB.6/2018
Tanggal : April 2018

K/L : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
BA : 067

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
JUMLAH KEWAJIBAN JCK PANJANG	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	6.631.153.786	12.460.230.243	12.460.230.243	6.631.153.786
EKUITAS	3.890.516.257.389	41.958.407.893	497.819.432.834	3.434.655.232.448
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.897.147.411.175	54.418.638.136	510.279.663.077	3.441.286.386.234

Jakarta April 2018
Kementerian/Lembaga

Sriyono
NIP: 19651014 198703 1 001

Ditjen Kekayaan Negara

Satriotomo
NIP: 19720620 199603 1 001

Badan Pemeriksa Keuangan

Gandung Siswantoro
NIP: 19780420 200604 1 003

Ditjen Perbendaharaan
Denny Febriano Singawiria
NIP: 196502 16198603 1 001

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2017
PER 31 DESEMBER 2017

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nomor : /PB.6/2018

Tanggal : April 2018

K/L : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BA : 067

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI		ASERSI FINAL
		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	7.228.543.249.511			7.228.543.249.511
SURPLUS/DEFISIT LO	(7.976.663.303.008)	59.040.068.165		(8.035.703.371.173)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS				
Penyesuaian Nilai Aset	-			-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-			-
Koreksi Nilai Persediaan	5.216.650.987			5.216.650.987
Selisih Revaluasi Aset Tetap	418.648.914.318	424.782.127.606	6.133.213.288	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	65.125.441.746	16.397.992.850	12.191.704.000	60.919.152.896
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(17.600.000)			(17.600.000)
Lain-lain	1.577.514.590			1.577.514.590
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	490.550.921.641	441.180.120.456	18.324.917.288	67.695.718.473
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS				
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.182.348.770.554			4.182.348.770.554
Diterima Dari Entitas Lain	(20.305.097.550)		21.331	(20.305.076.219)
Transfer Keluar	(26.305.413.681)		13.999.789.768	(12.305.643.913)
Transfer Masuk	12.347.129.922	23.369.450		12.323.760.472
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-			
Pengesahan Hibah Langsung	-		12.057.824.743	12.057.824.743
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-			
Setoran Surplus BLU	-			-
JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4.148.085.389.245	23.369.450	26.057.615.842	4.174.119.635.637
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	(3.338.026.992.122)	500.243.558.071	44.382.533.130	(3.793.888.017.063)
EKUITAS AKHIR	3.890.516.257.389	500.243.558.071	44.382.533.130	3.434.655.232.448

Jakarta April 2018

Kementerian/Lembaga

Sriyono
NIP: 19651014 198703 1 001

Badan Pemeriksa Keuangan

Gandung Siswantoro
NIP. 19780420 200604 1 003

Ditjen Kekayaan Negara

Satriotomo
NIP: 19720620 199603 1 001

Ditjen Perbendaharaan

Denny Febriano Singawiria
NIP. 196502 16198603 1 001

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017
(dalam rupiah)

067 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Lampiran BAR Tripartit
Nomor : /PB.6/2018
Tanggal : April 2018

URAIAN	Unaudited	Koreksi		Audited		
		Tambah	Kurang			
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN PERPAJAKAN						
Pendapatan Pajak Penghasilan	-			-		
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-			-		
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-			-		
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-			-		
Pendapatan Cukai	-			-		
Pendapatan Pajak Lainnya	-			-		
Pendapatan Bea Masuk	-			-		
Pendapatan Bea Keluar	-			-		
Pendapatan Pajak Lain-lain	-			-		
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-			-		
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK						
Pendapatan Sumber Daya Alam	-			-		
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-			-		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.397.016.927		21.331	2.396.995.596		
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2.397.016.927		21.331	2.396.995.596		
PENDAPATAN HIBAH						
Pendapatan Hibah	-			-		
Jumlah Pendapatan Hibah	-		-	-		
PENDAPATAN PENYESUAIAN						
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	2.397.016.927		21.331	2.396.995.596		
BEBAN OPERASIONAL						
Beban Pegawai	208.337.577.246			208.337.577.246		
Beban Persediaan	49.943.180.549		19.185.466.513	30.757.714.036		
Beban Barang dan Jasa	2.218.784.029.453			2.218.784.029.453		
Beban Pemeliharaan	33.325.065.044	4.255.280.850		37.580.345.894		
Beban Perjalanan Dinas	595.672.353.870			595.672.353.870		
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.864.200.254.443	19.185.466.513	973.369.450	1.882.412.351.506		
Beban Bunga	-			-		
Beban Subsidi	-			-		
Beban Hibah	-			-		
Beban Bantuan Sosial	-			-		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	399.636.307.364	76.050.125	1.317.426.894	398.394.930.595		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	74.477	4.750.000		4.824.477		
Beban Transfer	-			-		
Beban Lain-lain	-			-		
Beban Penyesuaian	-			-		
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	5.369.898.842.446	23.521.547.488	21.476.262.857	5.371.944.127.077		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5.367.501.825.519)	(23.521.547.488)	(21.476.241.526)	(5.369.547.131.481)		
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR						
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	462.370.000			462.370.000		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2.647.617.111.362	68.767.987.491	19.575.769.181	2.696.809.329.672		
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(2.647.154.741.362)	(68.767.987.491)	(19.575.769.181)	(2.696.346.959.672)		
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-		
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-			-		
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-		-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA						
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	104.334.068.833		12.057.824.743	92.276.244.090		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	66.340.804.960		4.255.280.850	62.085.524.110		
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37.993.263.873		7.802.543.893	30.190.719.980		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(2.609.161.477.489)	(68.767.987.491)	(11.773.225.288)	(2.666.156.239.692)		

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2017
(dalam rupiah)

067 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Lampiran BAR Triparit
Nomor : /PB.6/2018
Tanggal : April 2018

URAIAN	Unaudited	Koreksi		Audited
		Tambah	Kurang	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-			-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(7.976.663.303.008)	(92.289.534.979)	(33.249.466.814)	(8.035.703.371.173)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Gandung Siswantoro
NIP. 19780420 200604 1 003

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI			AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
41. Penerimaan Perpajakan	-	-	-			-	-	-	-
42. Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.305.097.550	-	20.305.097.550		21.331	(21.331)	20.305.097.550	21.331	20.305.076.219
421. Penerimaan Sumber Daya Alam			-			-	-	-	-
422. Pendapatan Bagian Laba BUMN			-			-	-	-	-
423. PNBP Lainnya	20.305.097.550		20.305.097.550		21.331	(21.331)	20.305.097.550	21.331	20.305.076.219
424. Pendapatan BLU			-			-	-	-	-
43. Penerimaan Hibah			-			-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	20.305.097.550	-	20.305.097.550	-	21.331	(21.331)	20.305.097.550	21.331	20.305.076.219

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI			AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
51	Belanja Pegawai	209.924.835.799	1.587.258.553	208.337.577.246			-	209.924.835.799	1.587.258.553	208.337.577.246
52	Belanja Barang	3.791.585.117.332	10.484.552.480	3.781.100.564.852			-	3.791.585.117.332	10.484.552.480	3.781.100.564.852
53	Belanja Modal	193.039.726.238	129.097.782	192.910.628.456			-	193.039.726.238	129.097.782	192.910.628.456
54	Pembayaran Bunga Utang			-			-	-	-	-
55	Subsidi			-			-	-	-	-
56	Hibah			-			-	-	-	-
57	Bantuan Sosial			-			-	-	-	-
58	Belanja Lain-lain			-			-	-	-	-
TOTAL		4.194.549.679.369	12.200.908.815	4.182.348.770.554	-	-	-	4.194.549.679.369	12.200.908.815	4.182.348.770.554



Sriyono
NIP: 19651014 198703 1 001

Denny Febriano Singawiria
NIP: 19650216 198603 1 001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Gandung Siswantoro
NIP. 19780420 200604 1 003

BA : 067 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Lampiran II
 Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan
 Keuangan
 Nomor : S-3507/PB.6/2018
 Tanggal : 17 April 2018

No.	Kode	Akun	Debit	Kredit
1	391114	Revaluasi Aset Tetap	2.286.955.550	
	134111	Jalan dan Jembatan		2.286.955.550
	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.213.300.813	
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		1.213.300.813
2	391114	Revaluasi Aset Tetap	479.893.882	
	133111	Gedung dan Bangunan		479.893.882
	391114	Revaluasi Aset Tetap	13.221.683.390	
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		13.221.683.390
3	134112	Irigasi	6.133.213.288	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		6.133.213.288
	391114	Revaluasi Aset Tetap	795.477.309	
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		795.477.309
4	391114	Revaluasi Aset Tetap	406.784.816.662	
	131111	Tanah		406.784.816.662
5	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	739.098.239	-
	591211	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	-	739.098.239
6	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan Dan Jembatan	407.909.535	-
	591311	Beban Penyusutan Jalan Dan Jembatan	-	407.909.535
7	591312	Beban Penyusutan Irigasi	76.050.125	-
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	76.050.125
8	133111	Gedung Dan Bangunan	2.394.141.000	-
	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	2.394.141.000
9	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	189.943.110	-
	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	189.943.110



BPK RI

PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2017

Indeks KKP : B.
 Disusun Oleh :
 Direviu Oleh :
 Disetujui Oleh :

T ACCOUNT JURNAL KOREKSI & REKLASIFIKASI
(Disajikan dalam Rupiah)

No	No Jurnal		Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2		3	4	5	6
1	PAJE 1	115212	Piutang Lainnya	950.000.000		
		526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah		950.000.000	
		594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya (05%*piutang)	4.750.000		
		116212	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya		4.750.000	
			(Double catat SPM atas belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik (belanja barang diserahkan kepada masyarakat berbentuk uang tunai) pada Ditjen PPMD)			
2	PAJE 2	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	133.850.000		
		131111	Aset Tanah		133.850.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Pidie)			
3	PAJE 3	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	91.939.800		
		131111	Aset Tanah		91.939.800	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bener Meriah)			
4	PAJE 4	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	69.685.100		
		131111	Aset Tanah		69.685.100	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sarolangun)			
5	PAJE 5	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	136.910.000		
		131111	Aset Tanah		136.910.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kubu Raya)			
6	PAJE 6	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	25.296.750		
		131111	Aset Tanah		25.296.750	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Kapuas Hulu)			
7	PAJE 7	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	117.200.000		
		131111	Aset Tanah		117.200.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas)			

No	No Jurnal		Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2		3	4	5	6
8	PAJE 8	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur)	104.575.000	104.575.000	
9	PAJE 9	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan)	234.397.500	234.397.500	
10	PAJE 10	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali)	162.544.037	162.544.037	
11	PAJE 11	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu Utara)	67.480.874	67.480.874	
12	PAJE 12	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kab. Luwu Timur)	176.663.637	176.663.637	
13	PAJE 13	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toraja Utara)	778.787.110	778.787.110	
14	PAJE 14	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe Selatan)	559.302.000	559.302.000	
15	PAJE 15	166112 131111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Aset Tanah (Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe)	16.297.239	16.297.239	

No	No Jurnal		Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2		3	4	5	6
16	PAJE 16	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	116.604.051		
		131111	Aset Tanah		116.604.051	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Konawe Utara)			
17	PAJE 17	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	37.614.000		
		131111	Aset Tanah		37.614.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bima)			
18	PAJE 18	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	35.929.896		
		131111	Aset Tanah		35.929.896	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kaur)			
19	PAJE 19	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	140.108.000		
		131111	Aset Tanah		140.108.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Tengah)			
20	PAJE 20	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	139.810.000		
		131111	Aset Tanah		139.810.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur)			
21	PAJE 21	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	131.411.529		
		131111	Aset Tanah		131.411.529	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur)			
22	PAJE 22	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	387.600.000		
		131111	Aset Tanah		387.600.000	
			(Penjelasan Koreksi: Aset Tanah dikoreksi karena merupakan kegiatan pertanahan ketransmigrasi yang bersumber dari belanja modal (MAK 53) dan secara fisik bukan milik K/L namun bagian dari kegiatan Program DKTP Ditjen PKP2Trans. Oleh karenanya dipindahkan pencatatannya ke Aset Lain-Lain (Aset Henti Guna yang selanjutnya akan diusulkan Hibah) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Teluk Wondama)			
23	PAJE 23	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	49.412.919.223		
		166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah		49.412.919.223	
		169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional P	16.568.056.644		
		596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		16.568.056.644	
			(Penjelasan Koreksi: Penghapusan melalui Hibah DKTP pada Setditjen PKP2Trans)			
24	PAJE 24	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	5.355.298.500		
		132111	Peralatan dan Mesin		64.330.000	
		133111	Gedung dan Bangunan		2.880.442.000	
		134111	Jalan dan Jembatan		2.307.991.500	
		134112	Irigasi		102.535.000	
		137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.656.429		
		137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	133.156.220		
		137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	258.154.315		
		137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4.661.463		
		596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		423.628.427	

No	No Jurnal	Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2	3	4	5	6
		(Penjelasan Koreksi: Penghapusan melalui Hibah DKTP pada Dinas Nakertrans Kab. Morowali Dirjen PKP2Trans)			
25	PAJE 25	Transfer Masuk 526311 Beban Barang Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	23.369.450	23.369.450	
		(Penjelasan Koreksi: Koreksi rekonsiliasi internal karena adanya kesalahan pembukuan pada Dinas Nakertrans Prov. Banten Dirjen PKP2Trans)			
26	PAJE 26	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 134111 Jalan dan Jembatan 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 391116 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 136111 KDP 391116 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Reklas pencatatan aset KDP berupa pekerjaan pembangunan jembatan di Kab. Ogan Ilir pada Dirjen PKTrans yang sebelumnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan)	12.142.712.000 48.992.000 170.419.120 12.142.712.000 12.142.712.000		
27	PAJE 27	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 218211 Hibah Langsung yang disahkan 218211 Hibah langsung yang disahkan 391131 Pengesahan Hibah Langsung (Hibah pada Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT yang belum tercatat namun sudah masuk ke dalam BUN)	12.057.824.743 12.057.824.743 12.057.824.743 12.057.824.743		
28	PAJE 28	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat Ditjen PKT)	89.945.702 89.945.702		
29	PAJE 29	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593149 Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Dan Kependudukan Provinsi Riau Ditjen PKT)	12.236.000 12.236.000		
30	PAJE 30	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593149 Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Sosial Nakertrans Provinsi Jambi Ditjen PKT)	6.160.000 6.160.000		
31	PAJE 31	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Selatan Ditjen PKT)	2.002.045.045 2.002.045.045		
32	PAJE 32	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593149 Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Kabupaten Lahat Ditjen PKT)	700.000 700.000		
33	PAJE 33	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat Ditjen PKT)	2.493.624.415 2.493.624.415		
34	PAJE 34	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593149 Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Kabupaten Barito Timur Ditjen PKT)	925.000 925.000		
35	PAJE 35	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593149 Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Ditjen PKT)	30.000.000 30.000.000		
36	PAJE 36	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Utara Ditjen PKT)	145.473.300 145.473.300		
37	PAJE 37	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat 593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Ditjen PKT)	347.935.800 347.935.800		

No	No Jurnal		Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2		3	4	5	6
38	PAJE 38	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Morowali Ditjen PKT)	22.780.000	22.780.000	
39	PAJE 39	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Ditjen PKT)	90.248.550	90.248.550	
40	PAJE 40	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara Ditjen PKT)	1.905.046.075	1.905.046.075	
41	PAJE 41	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Ditjen PKT)	52.570.000	52.570.000	
42	PAJE 42	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi NTB Ditjen PKT)	52.739.264	52.739.264	
43	PAJE 43	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi NTT Ditjen PKT)	1.224.643.928	1.224.643.928	
44	PAJE 44	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Ditjen PKT)	1.144.703.375	1.144.703.375	
45	PAJE 45	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Bengkulu Ditjen PKT)	1.934.010	1.934.010	
46	PAJE 46	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Bengkulu Ditjen PKT)	41.972.000	41.972.000	
47	PAJE 47	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara Ditjen PKT)	270.887.805	270.887.805	
48	PAJE 48	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Kabupaten Halmahera Timur Ditjen PKT)	11.280.000	11.280.000	
49	PAJE 49	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan untuk tujuan strategis dan berjaga-jaga (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Gorontalo Ditjen PKT)	2.314.454.762	2.314.454.762	
50	PAJE 50	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Gorontalo Ditjen PKT)	60.355.800	60.355.800	
51	PAJE 51	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat Beban Persediaan Lainnya (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Kabupaten Gorontalo Ditjen PKT)	267.917.000	267.917.000	

No	No Jurnal		Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2		3	4	5	6
52	PAJE 52	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Kependudukan dan Nakertrans Provinsi Papua Barat Ditjen PKT)	3.745.081.275 	3.745.081.275 	
53	PAJE 53	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Barat Ditjen PKT)	908.489.720 	908.489.720 	
54	PAJE 54	593128 593149	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Barat Ditjen PKT)	509.762.027 	509.762.027 	
55	PAJE 55	593128 593141	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat (Koreksi antar beban persediaan yaitu kelebihan pencatatan pada beban persediaan diserahkan ke masyarakat pada Satker Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Utara Ditjen PKT)	1.431.555.660 	1.431.555.660 	
56	PAJE 56	523111 135111 391116 593311	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Aset Tetap Renovasi Koreksi Aset Tetap non Revaluasi Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (Koreksi atas kesalahan pembebanan penyesuaian nilai persediaan pada Satker Kantor Pusat Ditjen PKP)	4.255.280.850 4.255.280.850 4.255.280.850 4.255.280.850	4.255.280.850 4.255.280.850 4.255.280.850 4.255.280.850	
57	PAJE 57	423221 313121	Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro DDEL koreksi atas penerimaan yang bukan pendapatan satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Rote Ndao Ditjen PKTrans	9.341 9.341	9.341 9.341	
58	PAJE 58	423221 313121	Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro DDEL koreksi atas penerimaan yang bukan pendapatan satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Timor Tengah Selatan Ditjen PKTrans	7.832 7.832	7.832 7.832	
59	PAJE 59	423221 313121	Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro DDEL koreksi atas penerimaan yang bukan pendapatan satker ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Alor Ditjen PKTrans	4.158 4.158	4.158 4.158	
60	PAJE 60	596111 313211	Beban Kerugian Pelepasan Aset Transfer Keluar koreksi atas penerimaan yang bukan pendapatan satker ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Alor Ditjen PKTrans	13.999.769.768 13.999.769.768	13.999.769.768 13.999.769.768	
61	PAJE 61	117199 313211	Persediaan Lainnya Barang Konsumsi Koreksi terhadap satker eks PDT	100.000 100.000	100.000 100.000	
62	PAJE 62	117124 117127 117125	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat Koreksi terhadap satker eks PDT	2.655.652.000 296.282.000 2.359.370.000	2.655.652.000 296.282.000 2.359.370.000	
63	PAJE 63	117124 117128 117125	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat Koreksi terhadap satker eks PDT	910.493.000 536.340.000 374.153.000	910.493.000 536.340.000 374.153.000	
64	PAJE 64	111613 111611	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP Kas di Bendahara Pengeluaran Koreksi terhadap satker eks PDT	402.405.500 402.405.500	402.405.500 402.405.500	
65	PAJE 65	117128 117199	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Persediaan Lainnya Koreksi terhadap satker eks PDT	219.125.385.814 219.125.385.814	219.125.385.814 219.125.385.814	
66	PAJE 66	166112 166111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan Aset Lain-lain Koreksi terhadap satker eks PDT	10.183.030.000 10.183.030.000	10.183.030.000 10.183.030.000	

No	No Jurnal		Keterangan	Debet	Kredit	Ref KKP
1	2		3	4	5	6
67	PAJE 67	117199	Persediaan Lainnya	76.682.773.194		
		117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		76.682.773.194	
			<i>Koreksi terhadap satker eks PDT</i>			
68	PAJE 68	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.082.750		
		169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		1.082.750	
			<i>Koreksi terhadap satker eks PDT</i>			
69	PAJE 69	212112	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	19.779.843		
		212191	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		19.779.843	
			<i>Koreksi terhadap satker eks PDT</i>			
			JUMLAH	476.699.034.786	476.699.034.786	

Jakarta, April 2018

Kementerian/Lembaga

Badan Pemeriksa Keuangan



Ekatmawati

NIP: 19620521 199003 2 006



Gandung Siswantoro

NIP. 19780420 200604 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPOTOSUHARDJO III LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3847068, 3449230 EXT. 5500 FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S-3507 /PB.6/2018

17 April 2018

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Nilai Koreksi atas Hasil Revaluasi BMN Tahun 2017

Yth. Para Kepala Biro Keuangan (lampiran I)

Kementerian Negara/Lembaga

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kementerian Negara Lembaga (LKKL) Tahun 2017 *Audited*, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 tahap II salah satunya menyatakan bahwa hasil revaluasi tidak disajikan secara menyeluruh untuk satu kelompok aset dan terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian.
2. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah dan BPK RI menyepakati bahwa pada penyusunan LKPP dan LKKL Tahun 2017 *Audited*, hasil revaluasi seluruh Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2017 tidak disajikan dalam *face* LKKL Tahun 2017 *Audited*, namun diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Oleh karena itu, atas hasil revaluasi BMN yang telah disajikan dalam *face* LKKL Tahun 2017 perlu dilakukan koreksi melalui Satker Konsolidasi.
3. Sehubungan dengan angka 2 di atas, dengan ini disampaikan daftar koreksi/jurnal sebagai dasar dalam pelaksanaan koreksi atas penyajian nilai revaluasi BMN dimaksud (lampiran II).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Barang Milik Negara
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

DAFTAR KEPALA BIRO KEUANGAN

No.	Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga:
1.	Kepala Biro Keuangan Setjen MPR
2.	Kepala Biro Keuangan Setjen DPR
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4.	Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
5.	Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
6.	Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
7.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
8.	Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
9.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
10.	Kepala Pusat Keuangan Setjen Kementerian Pertahanan
11.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
13.	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
14.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
15.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16.	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
17.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
18.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
19.	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama
20.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
21.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
22.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
24.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
26.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
27.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian Kementerian Pariwisata
29.	Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30.	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
32.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33.	Kepala Biro SDM dan Umum Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

No.	Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga:
34.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
35.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara
36.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
37.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
40.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
41.	Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara RI
42.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama BPOM
43.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
44.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
45.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
46.	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
47.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN Sekretariat Utama BKKBN
48.	Kepala Biro Umum Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50.	Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
51.	Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian Setjen Mahkamah Konstitusi
52.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama LIPI
54.	Kepala Biro Umum Badan Tenaga Nuklir Nasional
55.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57.	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
58.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara
60.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
61.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
62.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
63.	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
64.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
65.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
66.	Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
67.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
68.	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI
69.	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP
70.	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Basarnas

No.	Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara/Lembaga:
71.	Kepala Divisi Umum Sekretariat BP Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
72.	Kepala Biro Keuangan, Umum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73.	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75.	Kepala Biro Administrasi Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
76.	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
77.	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
78.	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang



BA : 067 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Lampiran II
 Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan
 Keuangan
 Nomor : S- 3507/PB.6/2018
 Tanggal : 17 April 2018

No.	Kode	Akun	Debit	Kredit
1	391114	Revaluasi Aset Tetap	2.286.955.550	
	134111	Jalan dan Jembatan		2.286.955.550 ✓
	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.213.300.813	
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		1.213.300.813 ✓
2	391114	Revaluasi Aset Tetap	479.893.882	
	133111	Gedung dan Bangunan		479.893.882 ✓
	391114	Revaluasi Aset Tetap	13.221.683.390	
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		13.221.683.390 ✓
3	134112	Irigasi	6.133.213.288	
	391114	Revaluasi Aset Tetap		6.133.213.288 ✓
	391114	Revaluasi Aset Tetap	795.477.309	
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		795.477.309 ✓
4	391114	Revaluasi Aset Tetap	406.784.816.662	
	131111	Tanah		406.784.816.662 ✓
5	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	739.098.239	-
	591211	Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	-	739.098.239 ✓
6	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan Dan Jembatan	407.909.535	-
	591311	Beban Penyusutan Jalan Dan Jembatan	-	407.909.535 ✓
7	591312	Beban Penyusutan Irigasi	76.050.125	-
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	76.050.125 ✓
8	133111	Gedung Dan Bangunan	2.394.141.000	-
	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	2.394.141.000 ✓
9	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	189.943.110	-
	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	189.943.110 ✓